

ISTHIGATSAH
DALAM MASYARAKAT MUSLIM NAHDLATUL ULAMA:
Kajian Sosiologis-Antropologis Pada Masyarakat Nahdliyin Jawa Barat

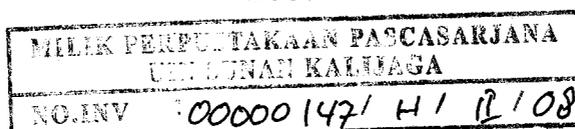


2x6.612
ABD
i
e.1

Oleh:
Boedi Abdullah
NIM 13. 389. BR

DISERTASI
Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA
2007



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Boedi Abdullah, M.Ag.

NIM : 03.3.389.BR

Jenjang : Doktor

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 April 2007

Yang menyatakan,



Drs. H. Boedi Abdullah, M.Ag.

NIM. 03.3.389.BR



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Drs. H. Akh Minhaji, M.A., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. H. Irwan Abdullah



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertai berjudul:

ISTIGHATSAH
DALAM MASYARAKAT MUSLIM NAHDHATUL ULAMA:
Kajian Sosiologis-Antropologis pada Masyarakat Nahdliyin Jawa Barat

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. H. Boedi Abdullah, M.Ag.
NIM : 03.3.389-BR
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Desember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,

Rektor

§ Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**ISTIGHATSAH
DALAM MASYARAKAT MUSLIM NAHDHATUL ULAMA:
Kajian Sosiologi-Antropologis pada Masyarakat Nahdliyin Jawa Barat**

yang ditulis oleh:

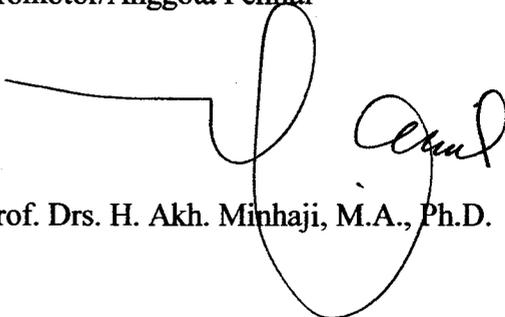
Nama : Drs. H. Boedi Abdullah, M.Ag.
NIM : 03.3.389-BR
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Desember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 April 2007

Promotor/Anggota Penilai



Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

ISTIGHATSAH
DALAM MASYARAKAT MUSLIM NAHDHATUL ULAMA:
Kajian Sosiologi-Antropologis pada Masyarakat Nahdliyin Jawa Barat

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. H. Boedi Abdullah. M.Ag
NIM : 03.3.389-BR
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Desember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 April 2007
Promotor/Anggota Penilai



Prof. Dr. H. Irwan Abdullah

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**ISTIGHATSAH
DALAM MASYARAKAT MUSLIM NAHDHATUL ULAMA:
Kajian Sosiologi-Antropologis pada Masyarakat Nahdliyin Jawa Barat**

yang ditulis oleh:

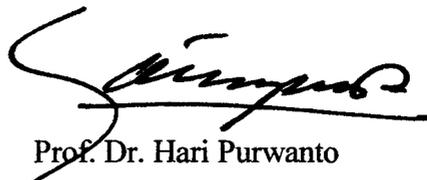
Nama : Drs. H. Boedi Abdullah, M.Ag.
NIM : 03.3.389-BR
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Desember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 April 2007

Anggota Penilai


Prof. Dr. Hari Purwanto

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**ISTIGHATSAH
DALAM MASYARAKAT MUSLIM NAHDHATUL ULAMA:
Kajian Sosiologi-Antropologis pada Masyarakat Nahdliyin Jawa Barat**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. H. Boedi Abdullah. M.Ag
NIM : 03.3.389-BR
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Desember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Maret 2007

Anggota Penilai



Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**ISTIGHATSAH
DALAM MASYARAKAT MUSLIM NAHDHATUL ULAMA:
Kajian Sosiologi-Antropologis pada Masyarakat Nahdliyin Jawa Barat**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. H. Boedi Abdullah, M.Ag.
NIM : 03.3.389-BR
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Desember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 April 2007

Anggota Penilai



Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain

ABSTRAK

Penelitian tentang *ISTIGHATSAH DALAM MASYARAKAT MUSLIM NAHDLATUL ULAMA: Kajian Sosiologis-Antropologis Pada Masyarakat Nahdliyin Jawa Barat* ini dilatarbelakangi dengan adanya faktor sosial tentang kegiatan ritual *istighatsah* yang dilakukan oleh masyarakat Nahdliyin di Jawa Barat yang tampak pada berbagai lingkungan sosial, baik kalangan birokratis maupun politik. Ritual tersebut nyatanya merupakan suatu upaya mencari solusi atas dasar keyakinan terhadap problem yang dihadapi, sekaligus memantapkan, memperjelas dan mempertegas konsep dan rumusan tentang sesuatu kegiatan ritual yang diyakininya.

Atas dasar latar belakang tersebut, pokok masalah yang akan dipecahkan adalah: 1). Bagaimana konsep ritual *istighatsah* menurut pandangan kaum Nahdliyin Jawa Barat, 2). Bagaimana kegiatan ritual *istighatsah* dipandang sebagai faktor penentu menurut kaum Nahdliyin Jawa Barat, dan 3). Bagaimana fungsi *istighatsah* dan implikasinya terhadap dinamika sosial politik dan budaya kaum Nahdliyin di Jawa Barat.

Teori yang dipergunakan adalah teori Weber dan Durkheim, bahwa bentuk-bentuk agama tertentu dan doktrinnya merupakan refleksi dari infrastruktur sosio-ekonomi terutama hubungan antar masyarakat, dengan mempergunakan pendekatan sosiologi agama dan tidak pula mengesampingkan antropologi agama. Pendekatan keduanya dipergunakan mengingat asumsi dasar yang berkenaan dengan konsep-konsep sosiologi dan antropologi yang dapat dijadikan analisis terhadap kajian ini.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian seksama tentang bagaimana konsep, pandangan dan implementasi suatu tindakan sosial, dari metode ini dipandang dapat mengarahkan, memaparkan atau menggambarkan apa yang dilakukan masyarakat Nahdliyin di Jawa Barat.

Hasil penelitian dalam laporan disertasi ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1). Ritual *istighatsah* pada masyarakat Nahdliyin di Jawa Barat diketahui secara rinci terbentuk berdasarkan norma yang telah menjadi institusi sosial dan berguna bagi kegiatan komunikasi dan partisipasi politik. 2). Ritual *istighatsah* merupakan esensi kebiasaan pengamalan agama, tetapi belum menyentuh hakikat tata kelakuan yang memiliki efek sosial. Sedangkan bagi penguasa, *istighatsah* menunjukkan suatu alat dalam menjalin relasi dengan mengambil simbol agama, dan 3). Keberadaan ritual *istighatsah* belum menjadi pengatur dan pengawas tata kehidupan di masyarakat Jawa Barat. 4). Kontribusinya sebagai corak asimilasi budaya Islam dengan budaya Sunda. 5). Fungsi *istighatsah* sebagai fungsi ritual berdampak pada aspek sosial politik yang signifikan. Dalam dimensi ritual berfungsi sebagai media komunikasi antar hamba dengan Tuhan, sedangkan dalam dimensi sosial politik berfungsi sebagai media menumbuh-kembangkan solidaritas sosial di kalangan masyarakat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Vokal dan Konsonan

ا : a	ط : th
ب : b	ظ : zh
ت : t	ع : 'a
ث : ts	غ : gh
ج : j	ف : f
ح : h	ق : q
خ : kh	ك : k
د : d	ل : l
ذ : dz	م : m
ر : r	ن : n
ز : z	و : w
س : s	↑ : h
س : sy	ي : y
ش : sh	ة : t
ض : dl	

2. Vokal Tunggal

ا	:	a	contoh:	كَتَبَ	: kataba
اِ	:	i	contoh:	زُكِرَ	: zukira
اُ	:	u	contoh:	سُئِلَ	: suila

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

ا	:	<u>a</u>	contoh:	سِيَّاسَة	: siyasa <u>h</u>
اِ	:	<u>i</u>	contoh:	الْقَرِيبُ	: al-qarib
اُ	:	<u>u</u>	contoh:	الشُّورَى	: asy-syura

4. Vokal Rangkap

اِي	:	ay	contoh:	كَيْفَ	: kaifa
اُو	:	aw	contoh:	حَوْلَ	: haula



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang belum diketahuinya. Shalawat dan salam penulis tetap kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai pembawa cahaya dan rahmat bagi seluruh alam. Atas rahmat dan hidayahNya penulis telah berhasil melakukan penelitian dan penulisan disertasi yang berjudul, *ISTIGHATSAH DALAM MASYARAKAT MUSLIM NAHDHATUL ULAMA (Kajian Sosiologis-Antropologis dalam Istighatsah bagi Masyarakat Nahdhiyin di Jawa Barat)*.

Penyelesaian penelitian dan penulisan disertasi ini melalui proses yang cukup panjang dan telah banyak melibatkan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berjasa dan membantu penulis, antara lain yang terhormat:

Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA., sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menghadirkan disertasi ini.

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji. M.A., Ph.D dan Prof Dr. Irwan Abdullah sebagai promotor yang amat terpelajar dalam memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang amat bermutu sejak persiapan, pelaksanaan, dan penulisan laporan hingga disertasi ini diujikan dan disahkan sebagai karya ilmiah.

Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana beserta staf yang tak bosan-bosannya memberi pelayanan yang optimal selama penulis mengikuti studi hingga berakhir nanti.

Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah memberikan sarana, fasilitas dan membantu mencari berbagai referensi yang penulis perlukan guna menjadi bahan rujukan pada penulisan disertasi, di samping selama mengikuti kuliah di Pascasarjana.

Semua tenaga pengajar yang amat terpelajar, para dosen dan Guru Besar dengan ketulusan mereka memberi curahan ilmunya yang amat berguna bagi penulis untuk senantiasa mejadi pelajar yang belajar seumur hidup.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, MS., dan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, MS., yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi Program Doktor (S3) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga selesai.

Para *Ajengan* yang dimuliakan Allah Swt. telah memberikan pemikiran, waktu, tenaga dan fasilitas tempatnya sebagai sarana dalam pertemuan dengan penulis, selama wawancara, berdiskusi dan menemukan berbagai informasi yang berguna bagi penyempurnaan isi disertasi ini.

Rekan-rekan sejawat di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi motivasi dan selalu menghibur penulis di kala suka dan duka yang hampir patah semangat selama studi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu.

Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada ayahanda dan ibunda yang dengan sepenuh hati memberi kasih sayang, pengorbanan moril maupun material serta do'a pada penulis untuk mencapai tangga-tangga kesuksesan dalam mencari ilmu ini. Hat serupa juga dihaturkan kepada kedua mertua yang tanpa dorongan mereka, penulis tak bisa menggerakkan hasrat ke arah cita-cita sebagai muslim yang mampu memiliki kekuatan iman, keluasan ilmu dan berjihad di jalan Allah.

Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada istri tercinta dan anak-anak yang menjadi permata hati, mereka telah memberi semangat tersendiri bagi penulis untuk secepatnya menyelesaikan studi. Penulis menyadari karena sebagian waktu dan curahan kasih buat mereka telah terambil untuk studi, termasuk rizki mereka sering terganggu. Semoga mereka membuka pintu maaf atas kekurangan dan keprihatinan selama ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam tulisan ini, karena tak ada gading yang tak retak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis amat menantikan masukan, saran, dan kritikan berbobot demi penyempurnaan nilai akademik disertasi ini.

Harapan terdalam penulis, betapapun kecilnya hasil kajian ini, semoga menambah setitik khazanah kepustakaan yang berharga, semoga Allah Swt. meridlai atas perbuatan karya penulis ini hingga memasukkannya pada nilai ibadah. *Amin.*

Yogyakarta, Maret 2006

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Landasan Teori	15
F. Metode Penelitian	40
1. Strategi Penelitian	40
2. Metode yang Digunakan	42
3. Tahap Penelitian di Lapangan	46
4. Pemilihan Informan	47
5. Teknik Pengumpulan Data.....	48
6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	49
7. Analisis Data	50
8. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
G. Sistematika Pembahasan	52
BAB II DINAMIKA TRADISI KAUM NAHDLIYIN	55
A. Asal Usul dan Tradisi Masyarakat Jawa Barat	55
1. Awal Pertumbuhan Islam di Jawa Barat	55
2. Awal Perkembangan Islam di Jawa Barat	59
3. Corak Budaya dan Peradaban Islam Jawa Barat	64
4. Corak Pandangan Kesundaan di Jawa Barat	69
5. Gerakan Sosial Islam Awal di Jawa Barat	73
6. Profil Anwar Musaddad Tokoh NU Jawa Barat	79
B. Transformasi Politik Aliran Kaum Nahdliyin	84
1. Corak Perubahan Pemikiran Politik Aliran	84
2. Corak Pemikiran Islam Kaum Nahdliyin	89
3. Corak Keekerabatan Politik Nahdliyin	98

C. Stratifikasi Sosial Masyarakat Jawa Barat	103
D. Simbol-simbol Keagamaan Kaum Nahdliyin	110
BAB III MENELUSURI AKAR BUDAYA KAUM NAHDLIYIN	123
A. Sekilas Terbentuknya NU	123
B. Paham Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah	134
C. Paham Madzhab Fikih/ <i>Legal Maxime</i>	140
D. Paham Sunni dalam Dinamika Politik NU	143
1. Internalisasi Ideologi Paham Sunni	143
2. Sosialisasi Aswaja di Kalangan Nahdliyin	148
3. Aktualisasi Politik NU Pasca Khittah	164
E. Basis Penyebaran Paham Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah ...	166
F. Fenomena Sosio-Kultural Kaum Nahdliyin	174
G. Hubungan Keekerabatan dalam NU	183
H. Tradisi Kaum Nahdliyin	190
BAB IV ISTIGHATSAH DALAM PERKEMBANGAN	
MASYARAKAT NAHDLIYIN DI JAWA BARAT	194
A. Konsep dan Teori Istighatsah	194
B. Akar Mistifikasi Ritual Istighatsah	204
C. Ritual Istighatsah dalam Pengukuhan Kekuasaan	221
D. Ritual Istighatsah dalam Menggalang Kekuatan	242
E. Ritual Istighatsah dalam Membangun Solidaritas Sosial ...	253
BAB V ANALISIS SOSIAL KONTEKSTUAL <i>ISTIGHATSAH</i>	267
A. <i>Istighatsah</i> Sebagai Amalan Kaum Nahdliyin	267
1. <i>Istighatsah</i> dalam Bentuk Hadiwan	275
2. <i>Istighatsah</i> Menuai <i>Barakah</i> Para Wali	282
B. Hakekat <i>Istighatsah</i> bagi Masyarakat Jawa Barat	287
1. Meretas Akar Persoalan Sosio-kultural	289
2. Model Perekatan Solidaritas dalam Pluralitas Sosial ...	293
3. Ekspresi Keberagamaan Menuju Kebersamaan	297
C. Konkretisasi Acuan dan Kaidah <i>Istighatsah</i>	300
1. Tahlilan	301
2. Marhabanan	306
3. Ziarah Kubur	309
4. Syukuran	312
D. Makna <i>Istighatsah</i> dalam Tradisi Nahdliyin	318
E. Makna Ritus <i>Wirid</i> dalam Tradisi Nahdliyin	346
1. Makna Istighfar	349
2. Makna Shalawat	351
3. Makna Dzikir	353
BAB VI PENUTUP	361
A. Kesimpulan	361
B. Rekomendasi	363

DAFTAR PUSTAKA	365
LAMPIRAN-LAMPIRAN	379
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	397



DAFTAR SINGKATAN

AD/ART NU	= Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
AII	= Al-Ittihadiyahul Islamiyah
ASEAN	= Association South East Asia Nation
BPUPKI	= Badan Perencanaan Untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DEPDIKBUD	= Departemen Pendidikan Nasional, sekarang DEPDIKNAS
DI	= Darul Islam
DKM	= Dewan Keluarga Mesjid
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GOLKAR	= Golongan Karya
HU	= Harian Umum
IAIN	= Institut Agama Islam Negeri
KAMI	= Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KKN	= Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KNIP	= Komite Nasional Indonesia Pusat
KPU	= Komisi Pemilihan Umum
KUA	= Kantor Urusan Agama
LAKPESDAM	= Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
LPPM UIN	= Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat UIN
MA	= Mahkamah Agung
MASYUMI	= Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MIAI	= Majelis Islam A'la Indonesia
MLB	= Musyawarah Luar Biasa
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
NU	= Nahdlatul Ulama
P3M	= Pusat Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat
PAN	= Partai Amanat Nasional
PBB	= Partai Bulan Bintang
PBNU	= Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PBR	= Partai Bintang Reformasi
PDI	= Partai Demokrasi Indonesia
PELINDO II	= Pelabuhan Indonesia II
PERSIS	= Persatuan Islam
PIB	= Partai Indonesia Baru
PII	= Partai Islam Indonesia
PILKADA	= Pemilihan Kepala Daerah
PKB	= Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	= Partai Komunis Indonesia

PKS	= Partai Keadilan Sejahtera
PKU	= Partai Kebangkitan Umat
PNU	= Partai Nahdlatul Umat
PO	= Persyarikatan Oelama
POI	= Perikatan Oemat Islam
POII	= Persatuan Oemat Islam Indonesia
PPN	= Pegawai Pencatat Nikah
PPP Reformasi	= Partai Persatuan Pembangunan Reformasi
PSII	= Partai Syarikat Islam Indonesia
PTAIN	= Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
PUI	= Partai Umat Islam
PUII	= Persatuan Umat Islam Indonesia
PUMI	= Persatuan Umat Muslim Indonesia
PW NU	= Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
SBY	= Susilo Bambang Yudhoyono
SDI	= Sarikat Dagang Islam
SI MPR	= Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat
SI	= Syarikat Islam
TNI	= Tentara Nasional Indonesia
UIN	= Universitas Islam Negeri

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Alat Pengumpul Data	379
2. Lampiran 2: Surat Pernyataan Informan	385
3. Lampiran 3: Do'a <i>Istighatsah</i>	394
4. Lampiran 4: Salawat Thoriqoh	395
5. Lampiran 5: Riwayat Hidup Penulis	397



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istighatsah dalam perspektif antropologi (unsur religi) dapat dipahami melalui suatu tindakan, yakni upacara (*rites* atau *ritual*). Upacara tersebut merupakan unsur religi yang terkecil; unsur itu dinyatakan dalam realitas dengan keanekaragamannya. Ada yang dirangkaikan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu kompleks rangkaian dan yang mempunyai urutan yang stereotip; dan inilah yang disebut dengan sistem upacara. Upacara tersebut dapat digolongkan menjadi yang kalendaris dan non-kalendaris. Yang pertama biasanya dilakukan secara bersama-sama, sedangkan yang terakhir dilakukan secara individual. Wallace melihat upacara sebagai unsur yang esensial dalam religi.¹

Upacara *istighatsah* menarik banyak perhatian untuk ditelaah karena berbagai alasan. Aktivitas *istighatsah* yang menunjukkan tingkah laku religius itu tidaklah didasarkan pada suatu program para kiai atau organisasi tertentu semata. Upacara *istighatsah* itu adalah suatu dramatisasi do'a, menjadikan do'a itu hal yang nyata dan do'a itu sendiri adalah dasar bertumpunya tindakan sosial. Do'a dan upacara itu tidak hanya saling berkaitan tetapi pula secara bersama-sama memberi dasar suatu model sikap moral yang benar dalam kehidupan yang serba duniawi. Menurut Wallace, "Religi itu adalah serangkaian upacara yang dirasionalkan oleh mitos, yang mengarahkan sejumlah kekuatan adikodrati, bertujuan memperoleh suatu transfor-

¹Anthony Wallace, *An Anthropological View* (New York: Random House, 1966), hlm. 68.

masi keadaan atau mempertahankan keadaan itu dalam diri manusia dan alam”.² Ada lima macam upacara, yakni (a) sebagai teknologi, (b) sebagai terapi atau antiterapi, (c) sebagai kontrol sosial, (d) sebagai jalan menuju keselamatan, dan (e) sebagai revitalisasi.³

Timbul pertanyaan: upacara *istighatsah* yang paling pokok, yang menjadi inti hakikat, yang dapat menggambarkan keseluruhan sistem religi masyarakat yang bersangkutan? Apakah upacara yang berada di seputar lingkaran hidup, ataukah yang berada di sepanjang kegiatan bermata pencaharian, ataukah yang berada di seputar perubahan musim dan peristiwa-peristiwa alam? Kelihatannya berbagai upacara pada berbagai masyarakat bersahaja memang berada di seputar tiga keadaan tersebut. Berbagai masyarakat kota atau desa yang sudah maju juga memperlihatkan kesungguhan dan organisasi pelaksanaan upacara yang berbeda-beda. Ada yang menekankan upacara di seputar lingkaran hidup seperti pada masyarakat Nahdliyin Jawa Barat, ada pula yang menekankan upacara di seputar mata pencaharian seperti yang terdapat pada orang Sunda tatkala mau panen, orang Tiong Hoa (upacara Imlek), dan ada pula yang memusatkan perhatian pada upacara di seputar perubahan musim pilkada dan pemilu seperti yang terdapat di kalangan ormas, partai, dan pemerintahan.

Upacara atau ritual *istighatsah* dalam perspektif Islam merupakan salah satu media komunikasi yang efektif hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Awalnya hubungan vertikal tersebut diawali oleh inisiatif manusia untuk mengkomunikasikan keinginannya agar dapat dikabulkan oleh Tuhan, perkembangan

²*Ibid.*, hlm. 113.

³*Ibid.*

selanjutnya, ternyata bisa menjadi media dialog bathin antara makhluk dengan Khaliknya, diajarkan secara formal dari agama.⁴ Selain itu, apakah benar ritual *istighatsah* itu dilakukan karena keadaan manusia yang tidak berdaya lagi melakukan sesuatu dalam perjalanan hidup, berakumulasi antara rasa takut (*khauf*) dan harapan (*raja'*)?

Istighatsah menjadi “sebuah ritus keagamaan yang bertujuan memohon dan bermunajat kepada Tuhan”. Ritus yang dikenal lekat dengan kultur warga Nahdliyin ini dilakukan dengan sponsor seperti dari para pejabat di berbagai tempat, antara lain dilakukan ketika menghadapi badai krisis, atau muncul pada saat terjadi pergantian jabatan.⁵

Dalam konteks moralitas, umat Islam yang tidak atau jarang berdo'a dipandang sebagai orang yang sombong (*takabur*) dan dimurkai Tuhan. Ia merasa dirinya sudah tidak membutuhkan lagi bantuan dari pihak lain, termasuk dari Tuhannya sendiri. Sikap seperti ini dipandang oleh norma ajaran Islam sebagai sikap yang menyalahi *fitrah* kemanusiaan.⁶ Oleh karena itu, ritus tampak begitu penting, maka dinamika ajaran Islam selain memberikan justifikasi akan kewajiban berdo'a

⁴Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi, Makna Agama di Tangan Elite Penguasa* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), hlm. 4. Dalam konteks sosiologis, ritus *istighatsah* ini menarik untuk diteliti, mengingat pasca rezim Orde Baru berakhir hingga keluar memorandum II, sebanyak 4 kali *istighatsah* dengan pengerahan massa besar-besaran, diselenggarakan kaum Nahdliyin. Ritus *Istighatsah Kubra I* diadakan 5 Juli 1998, saat bangsa Indonesia sedang melakukan suksesi kepemimpinan nasional. *Istighatsah Kubra II* digelar 25 Juli 1999 ketika terjadi konflik kepentingan antar partai menjelang pemilu. *Istighatsah Kubra III* dilaksanakan 29 Juli 2000, menjelang dilaksanakannya Sidang Tahunan MPR di mana saat itu Gus Dur mulai terancam. *Istighatsah Kubra IV* dilaksanakan 29 April 2001, selang sehari sebelum Sidang Paripurna DPR (30 April 2001) dengan agenda mendengar jawaban Gus Dur atas Memorandum I. Dalam sidang kali itu, jawaban presiden ditolak sehingga lahirlah Memorandum II yang pada akhirnya mengantarkannya ke Sidang Istimewa MPR. Baca Khoiril Rosyadi, *Mistik Politik Gus Dur* (Yogyakarta: Jendela, 2004), hlm. 39. Dikutip dari koran harian “Dan Presiden pun Menangis”, *Massa*, 30 April-6 Mei 2001; “Histori Perjalanan Istighatsah”, dalam *Ibid.*, hlm. 15-17.

⁵Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi, Makna Agama di Tangan Elite Penguasa*, hlm. 5.

⁶Umar Ibrahim, *Thariqah 'Alawiyah*, terj. Tholib Anis (Bandung, Mizan, 2001) Bab III, “Pandangan al-Hadad tentang Tradisi Tarekat”, hlm. 105-148.

seperti *istighatsah* juga memberikan tuntutan operasionalnya.

Islam telah mengatur bagaimana cara *istighatsah* yang santun dan efektif untuk berdo'a, yang memungkinkan tersebut dikabulkan oleh Allah Swt.⁷ Sejarah kontemporer bangsa Indonesia pasca pergantian rezim Orde Baru ditandai oleh berbagai kerusuhan dan gonjang-ganjing politik yang melanda Nusantara dari tahun ke tahun terutama yang paling dekat sejak tahun 1997, membuat citra Nusantara semakin buruk di mata dunia. Sejak saat itu berbagai keterpurukan mendera bangsa Indonesia yang multi-krisis.⁸

Pergantian kepemimpinan nasional pasca Soeharto ke Habibie, lalu berganti kepada kepemimpinan Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan kini Susilo Bambang Yoedoyono, tampak belum mengakhiri krisis yang multi-dimensi.⁹ Di sini peran simbol keagamaan seperti ritus *istighatsah* yang banyak dilakukan umat Islam bersama para pejabat, bagi penulis amat menarik untuk dikaji secara khusus dalam konteks sosiologis.¹⁰

Kenyataan hampir sebagian besar umat Islam yang mayoritas menghuni republik ini menunjukkan gejala putus harapan melihat perkembangan bangsa Indonesia dewasa ini pasca reformasi. Tampak ketidakberdayaan mencari solusi terhadap kebobrokan sudah melanda seluruh sendi kehidupan bangsa, merasuki seluruh lapisan masyarakat, dan merembes semua daerah di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kesengsaraan, kemelaratan, degradasi, kebodohan, pertikaian,

⁷*Ibid.*, hlm. 241-255.

⁸M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2005), Bab VI, Indonesia Merdeka, hlm. 655-675. Baca pula *Republika*, 2001, hlm. 3.

⁹Robert W. Hefner, *Civil Islam*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: ISAI-LKiS, 2001), Bab 7, hlm. 281-352. Juga Arifin Ilham, *Indonesia Berdzikir* (Jakarta: Intuisi Press, 2004), hlm. 102.

¹⁰Khoirul Rosyadi, *Mistik Politik Gus Dur*, hlm. 39.

perpecahan, perselisihan, kriminalitas, pembunuhan, peledakan bom, ekonomi yang semakin menurun, hutang luar negeri yang terus naik dan dipersulit, bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, banjir tsunami, longsor, dan sebagainya), ditambah lagi pandangan minor luar negeri yang menyakitkan menyangkut kebangkrutan negara dan ketidakberdayaan memberantas korupsi, disamping konflik internal umat Islam yang acapkali timbul di berbagai daerah yang disebabkan persoalan ekonomi, politik, bahkan perbedaan pandangan prinsip keagamaan, sudah nyaris tak tertanggulangi.¹¹

Tampaknya pemimpin sepintar apapun tak akan dapat menolong dan menyelamatkan bangsa ini. Apakah memang tidak ada jalan keluar? Tentu solusinya ada, dan yang utama tampaknya adalah dikembalikan persoalannya kepada yang mengatur segala kehidupan manusia di bumi ini, Allah Swt., dan upaya bersama para pemimpin tingkat apapun yang selalu berpegang teguh kepada bisikan hati nurani selemah apapun, sehingga tidak terganggu oleh ambisi dan emosi pribadi. Sebab harus diakui, bangsa ini sedang mengalami masalah serius, yaitu masalah krisis multi dimensional, disintegrasi bidang persatuan dan kesatuan bangsa (suku, adat, budaya) di bidang agama, bidang *ukhuwah* antar tetangga, antar warga, antar kampung, dan antar suku.

Perpecahan atau disintegrasi itu tampaknya sudah merata secara teritorial, horizontal, dan vertikal. Dalam bingkai kejama'ahan dan kejam'iyahan itu, kaum Nahdliyin khususnya, tampak hendak bersikap jujur, strategis, dan realistis dalam membuka pintu-pintu besi kebodohan, kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan

¹¹S. Yunanto, *Pintu-pintu Menuju Kebangkitan Islam & Indonesia* (Jakarta: Forpis, 1999) hlm. 117-127; Hartono Ahmad Jaiz, *Gus Dur Menjual Bapak-nya* (Jakarta: Darul Falah, 2003), hlm. 98.

korupsi yang memblokir jalan menuju kebangkitan.¹²

Pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, para ulama masih mengusung organisasi masing-masing, kendati mereka sudah memiliki hubungan yang relatif baik. Pandangan yang bersifat tauhid dinyatakan:

*“Barang siapa memandang dunia karena ia ciptaan Tuhan dan mengetahuinya karena ciptaan Tuhan dan mencintainya karena ia ciptaan Tuhan, tidak mencari keselamatan kepada Tuhan, tidak mencintai Tuhan yang menyelamatkan ... ia adalah Yang Menyatu sejati yang tidak melihat sesuatu kecuali Tuhan, tidaklah orang yang bahkan tidak melihat pada dirinya demi dirinya, melainkan karena dia adalah hamba Tuhan ... orang seperti itu dikatakan ia sirna dalam kesatuan dan sirna dari dirinya sendiri”.*¹³

Pernyataan ini merupakan konsep tauhid yang mengkaitkan dengan kesalahan individual dan sosial sebagai tingkatan tauhid yang merupakan kepercayaan dasar umat Islam (yang menerima pernyataan bahwa tidak ada tuhan selain Allah). Orang yang memiliki komitmen kuat pada praktek Islam tetapi berusaha memperoleh keuntungan dan barakah pribadi sebagai hasil dan orang yang motif utamanya adalah mengabdikan kepada Allah. Tauhid itulah yang merupakan refleksi penafsiran dari pandangan para ulama dan para sufi.¹⁴

Perayaan pesta seperti *haul*, perkawinan, kematian, atau ulang tahun pesantren yang dipimpin seorang kiai, kaum Nahdliyin memiliki tradisi yang unik. Dalam menyusuri jejak unsur-unsur ideologi dan ritual yang mendasari aktivitas ritual kaum Nahdliyin, tampak pada inisiatif mereka ketika mengkomunikasikan keinginannya agar dikabulkan oleh Tuhan. Mereka selalu mempergunakan media

¹²A. Maftuh Abegebril dan A. Yani Abeveiro, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia* (Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm. 691, 726, 791.

¹³Annemarie Schimmel, *The Mystical Dimensions of Islam* (New York: University of North Carolina Press, 1975), hlm. 146.

¹⁴*Ibid.*

batin dari seseorang *kiai khos* atau “langitan” untuk memimpin *istighatsah* kepada sang Khalik. Do’a yang diajarkan secara formal dari agama mempunyai dimensi hubungan langsung kepada yang “di atas”, dalam hal ini Allah. Do’a itu dipanjatkan melalui forum *istighatsah*. Secara horizontal, do’a yang direfleksikan dalam bentuk interaksi antara sesama manusia sesuai dengan kebutuhan hidupnya ini, merupakan karakteristik kehidupan manusia yang saling ketergantungan antara sesamanya (*dependent*). Suatu simbol keagamaan yang dimiliki kalangan muslim Jawa umumnya, termasuk di dalamnya kaum Nahdliyin Jawa Barat, telah terbiasa dengan model mendekati diri kepada sang Khalik, termasuk memohon pertolongan melalui berbagai sistem, antara lain: (1) *tahlilan*, (2) *marhabaan*, (3) ziarah kubur, dan (4) *diwanan* (syukuran), baik secara individu maupun secara kolektif, dilakukan di rumah ataupun di surau atau di masjid-masjid.¹⁵

Bagaimana sebenarnya *istighatsah* di kalangan muslim Nahdliyin itu, apakah dipandang sebagai syari’at yang memang dibutuhkan masyarakat guna kepentingan memenuhi rasa haus rohaninya, atau hanya sekedar keinginan mewujudkan kepentingan sosial politik tertentu?

Ritus ini dikembangkan dalam masyarakat, berbentuk upacara pada waktu dan tempat tertentu yang merupakan agenda kegiatan yang berhubungan dengan dunia sosial politik. Do’a bersama melalui *istighatsah* seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat atau Wali Kota Bandung dalam rangka Gerakan Kebersihan Berbasis Masjid, diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2004 Pukul 08.30 sampai dengan selesai, tampak dihadiri Ketua Parpol se-Kota Bandung, KPU Jawa Barat dan

¹⁵Mark R. Woorward, *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, terj. Hairus Salim HS (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 76. Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 121.

seluruh Ketua DKM se-Kota Bandung. Do'a dipimpin oleh DR. H. Miftah Faridl, Ketua Majelis Ulama Kota Bandung.¹⁶ Hal itu membuktikan bahwa *istighatsah* di kalangan eksekutif dan legislatif Jawa Barat diterima keberadaannya. Fenomena ritual *istighatsah* tersebut ternyata telah banyak dikemas pada tingkat organisasi sosial ataupun institusi pemerintah.

Dengan demikian, di kalangan muslim Jawa Barat terdapat kesan bagi siapa saja yang memiliki akses politik, baik individual maupun komunal, kepada lembaga (NU misalnya) atau partai politik (PKB contohnya) tertentu, kini ritus *istighatsah* telah menjadi bagian ritual dalam kerangka perilaku politik dan agenda politik. Dengan sendirinya, *istighatsah* sebagai fenomena ritual telah berimplikasi terhadap kehidupan politik, seperti Pemilihan Umum, Pilkada dan lain-lain dalam rangka mempersamakan persepsi dan kekuatan politik, kebulatan tekad, memecahkan persoalan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, maka ritus *istighatsah* dihadirkan.¹⁷

Kaum di Jawa Barat hampir identik dengan komunitas *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (yang lebih kentara kaum Nahdliyin) yang terhimpun dalam organisasi Nahdhatul 'Ulama (NU). Oleh karena itu, tidaklah keliru kalau ada yang berpendapat, "Urang Sunda muslim lebih NU ketimbang mereka yang Nahdliyin". Lihat saja ketika terjadi penggalangan besar-besaran massa NU dalam acara do'a bersama *istighatsah* di tempat terbuka dihadiri tak terbatas kaum Nahdliyin saja.

¹⁶Penulis ikut serta dalam ritual *istighatsah* tersebut dari awal hingga akhir upacara.

¹⁷Sebagai ilustrasi, *istighatsah* yang dilaksanakan dalam acara Harlah PKB di Kemayoran yang dihadiri hampir 120.000 simpatisan PKB dan jama'ah Nahdliyin dari berbagai pelosok tanah air, Ahad, 9 Juli 2006. Juga *istighatsah* dalam rangka dukungan pada gerakan solidaritas umat Islam Libanon di alun-alun ibukota Probolinggo, Ahad, 6 Agustus 2006. Berkat kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pesantren Genggong Probolinggo. Hampir 15 ribu jama'ah NU dan santri hadir dalam acara tersebut. Juga di alun-alun Yogyakarta pada pembukaan MTQ yang diselenggarakan oleh Telkom, salah satu agendanya adalah *istighatsah*, Ahad, 13 Agustus 2006.

Di kalangan kaum Nahdliyin setiap hari ada saja acara *istighatsah*. Ritus *istighatsah* merupakan rutinitas yang bersifat pribadi-pribadi, tetapi ada juga yang dilakukan secara kolektif baik, di mushala, masjid, dan bahkan pesantren, termasuk di lapangan terbuka. Fenomena tersebut menggambarkan betapa uniknya di kalangan kaum, khususnya kaum Nahdliyin Jawa Barat. Mereka memiliki ritus keagamaan yang berdimensi sosial politik. Hal itu berkaitan erat dengan pemikiran dan pandangan sosial politik yang dianut para tokoh dan elit politik, para ulama Nahdhatul 'Ulama (NU) dan elit partainya seperti PKB.

Konsep dasar yang dijadikan rujukan memimpin ritus *istighatsah* biasanya memanggil seseorang yang mempunyai kapasitas keilmuan untuk memimpin ritual, Kiai atau *Ajengan* (penghormatan masyarakat Sunda pada ahli agama, memiliki atau tidak memiliki pesantren) sebagai ahlinya dalam menangkal bahaya. Oleh karena itu, kaum Nahdliyin Jawa Barat menjadikan *istighatsah* sebagai alternatif solusi dalam memecahkan masalah berbagai krisis kehidupan.

Dalam penelitian ini, objek kajian akademiknya adalah bagaimana ritual *istighatsah* kaum Nahdliyin Jawa Barat memberi arti dan makna bagi kehidupan sosial politiknya, dan mencari tahu sejauh mana argumen untuk menganalisis tradisi sosio-religius kaum Nahdliyin dalam logika "determinis" sebagai suatu alternatif kaum Nahdliyin Jawa Barat dalam menyasati krisis multi-dimensi menyangkut pula perubahan sosial maupun politiknya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis rumuskan menyangkut ritual *istighatsah* yang difokuskan pada tiga sudut objektifitasi masalah, yaitu:

1. *Istighatsah* dilihat dari konsep ritual keagamaan, bagaimana pandangan kaum Nahdliyin Jawa Barat.
2. *Istighatsah* ditinjau dari sudut sosiologis yang dipandang menjadi faktor penentu menurut kaum Nahdliyin Jawa Barat.
3. *Istighatsah* ditilik dari penerapan dan pelaksanaannya terhadap usaha memenuhi kepentingan sosial, politik, dan keagamaan menurut kaum Nahdliyin di Jawa Barat.

Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, kemudian dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ritual keagamaan *istighatsah* menurut pandangan kaum Nahdliyin Jawa Barat?
2. Bagaimana kegiatan ritual *istighatsah* dipandang sebagai faktor penentu menurut kaum Nahdliyin Jawa Barat?
3. Bagaimana fungsi *istighatsah* dan implikasinya terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya menurut kaum Nahdliyin Jawa Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang rinciannya telah disebutkan di atas, maka penelitian disertasi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis terhadap ritual *istighatsah* yang dilakukan kaum Nahdliyin dan NU, partai politik maupun institusi pemerintahan yang menggunakan media *istighatsah* sebagai mencari solusi dari berbagai krisis.
2. Mengkaji dan memahami struktur kognitif, alam pikiran, imajinasi, perasaan dan cita-cita kaum Nahdliyin Jawa Barat pada realitas sosial politik dalam

menemukan faktor-faktor kunci dan melakukan upaya integrasi dengan meredam konflik dinamika sosial politik di Jawa Barat.

3. Mengkaji konsep-konsep *istighatsah* dari perspektif sosiologis sebagai media yang efektif dalam mengendalikan krisis, konflik, dan mengkaji bentuk dan fungsinya sebagaimana yang dilakukan kaum Nahdliyin di Jawa Barat.

Sedangkan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik akademik maupun praktis, terutama bagi:

1. Pengembangan ilmu sosial yang berkaitan dengan teori-teori sosiologi agama. Terutama memberikan pengetahuan baru tentang *istighatsah* kaum Nahdliyin Jawa Barat dalam konteks budaya lokal.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam rangka pembangunan kesalehan sosial.
3. Sebagai bahan masukan melalui pintu keagamaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Jawa Barat.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu tentang perkembangan Islam di Jawa Barat yang menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi antara lain, Sartono Kartodirdjo¹⁸ memandang kebangkitan Islam abad ke-19 dipelopori oleh golongan umat Islam yang cenderung berpaham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Ummu Salamah dalam disertasinya menunjukkan, bahwa kaum tarikat memiliki dogma, ajaran, dan moral yang konsisten diaktualisasikan dalam kenyataan sosial.¹⁹ Nanat

¹⁸Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).

¹⁹Ummu Salamah, *Tradisi dan Akhlak Pengamal Tarekat* (Garut: Yayasan al-Musaddadiyah, 2001).

Fatah Natsir menemukan tentang pola asuh pendidikan anak yang memiliki etos kerja tinggi yang disebabkan oleh pandangan teologi Qadariah dan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.²⁰

Asep Saeful Muhtadi telah melukiskan peran NU dalam komunikasi politiknya menggunakan simbol-simbol keagamaan yang lebih efektif dan akomodatif.²¹ Kemudian disertasi Ali Anwar menunjukkan pandangan politik yang digali dari paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* turut membentuk lahirnya perbedaan pemikiran politik di lingkungan NU, ketidakterikatan NU pada salah satu partai didasarkan pada pemahaman keagamaan yang menjunjung kemaslahatan dan pemahaman politik paham Asy'ariyah yang menganut keseimbangan, kedamaian, dan ketentraman.²² Gunawan Undang menunjukkan hasil telaahannya, bahwa telah terjadi profanisasi peran kiai dalam fungsinya sebagai *cultural broker*. Namun peran kunci kiai di Jawa Barat masih memiliki kharisma dan ketokohnya tetap dimanfaatkan untuk legitimasi politik.²³

Di samping hasil penelitian lain seperti dari Karl D. Jackson mengenai kasus Darul Islam Jawa Barat, mengungkapkan peran kaum Nahdliyin dalam mengembangkan kewajiban mengurus masalah sosial politik.²⁴ Maka Hiroko Horikosi meneliti juga tentang kiai dan perubahan sosial yang ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal kiai dalam membuat berbagai keputusan dan langkah

²⁰Nanat Fatah Natsir, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim* (Bandung: Gunung Djati Press, 1999).

²¹Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama* (Jakarta: LP3ES, 2004).

²²Ali Anwar, *Dinamika Pemikiran Elite Politik Nahdlatul Ulama (NU): Menelusuri Gagasan Para Elite Partai Politik di Lingkungan NU* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).

²³Gunawan Undang, "Konflik dan Integrasi: Perubahan Gerakan Partai Politik Islam Pasca Orde Baru di Jawa Barat", *Disertasi*, pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2006, tidak diterbitkan.

²⁴Karl D. Jackson, *Kewibawaan, Tradisional, Islam, dan Pemberontakan*, terjemahan Bahasa Indonesia oleh Team Grafiti Press (Jakarta: Grafiti, 1990).

pemberdayaan.²⁵

Cornelis Van Dijk juga meneliti hal yang sama dengan Jackson tentang gerakan Darul Islam sebagai sebuah pemberontakan di Jawa Barat, namun menjadi pelopor adanya fenomena kaum Nahdliyin dalam mengungkapkan dan melindungi umat dari berbagai krisis.²⁶ Demikian beberapa kepustakaan yang dapat ditunjukkan penulis sebagai hasil penelitian terdahulu dan memberi inspirasi pada penulis untuk melakukan penelitian tentang *istighatsah* yang terdapat pada kaum Nahdliyin di Jawa Barat.

Berkaitan dengan penelitian *istighatsah* ini, penulis mendapat pengetahuan dari karya Ummu Salamah yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya kekuasaan adalah amanah (kepercayaan) yang bersumber dari Tuhan itu sendiri. Jika Tuhan belum menghendaki seseorang untuk berkuasa, meski orang tersebut sangat berambisi, tetap saja ia tidak akan mampu menyentuhnya. Begitu pula sebaliknya, meski seseorang tidak berambisi untuk menjadi penguasa, namun bila Tuhan mengizinkan, maka tidak ada yang mampu untuk membantah-Nya.

Untuk menuju singgasana kekuasaan, maka semua urusan harus diserahkan dan dikembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Manusia hanya mampu berusaha secara seimbang antara lahir dan batin. Langkah lahir itu meliputi *move* politik di gedung parlemen, mulai dari lobi politik hingga koalisi antar partai. Sedangkan langkah batin berupa *mujahadah*, *do'a* para kiai, *istighasah*, dan *istikharah* para

²⁵Hiroko Horikosi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987).

²⁶Cornelis Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, terjemahan Bahasa Indonesia oleh Team Grafiti Press (Jakarta: Grafiti Press, 1983).

ulama.²⁷

Dari hasil penelitian disertasi Ummu Salamah di atas, aspek ritus keagamaan belum banyak dikupas secara khusus. Hal itulah yang menarik penulis untuk mempelajarinya lebih lanjut dan ingin membuktikan bahwa simbol-simbol agama masih efektif dan tampak berperan dalam kehidupan sosial politik. Salah satu ritus *istighatsah* di kalangan NU yang banyak dilakukan bertujuan untuk meredam kembali atau *ishlah* di antara elit politik yang tengah bertikai. Peran upacara *istighatsah* dari jama'ah dan jam'iah NU dengan elit politik yang bersumber dari NU dipandang sangat efektif. Melalui forum dan pengajian yang mengerahkan massa sebagai langkah penyelesaian konflik, memberi kontribusi yang sangat besar dan ongkos politik yang relatif kecil.

Endang Turmudi mengemukakan, bahwa konflik yang muncul karena perbedaan pandangan politik kiai pun dapat melahirkan konflik tidak langsung di antara pengikutnya. Secara sosiologis penyelesaian konflik melalui pendekatan kiai tersebut menunjukkan fenomena peranan informal kiai sebagai *ummatan wasathan* (penengah/"wasit") dalam masyarakat. Selain itu, terdapat pandangan yang lainnya²⁸ tentang kepemimpinan kiai yang sedang mengalami proses perubahan yang ditandai oleh munculnya profanisasi kharisma, yaitu berkurangnya pengaruh kiai dalam masyarakat, perlu diuji ulang khususnya dalam konteks penyelesaian konflik-konflik politik partai-partai Islam pasca Orde Baru.

Demikian fenomena ritus keagamaan dalam bentuk ritus *istighatsah* kaum Nahdliyin Jawa Barat dalam konteks keperluan legitimasi pejabat tertentu, atau

²⁷Ummu Salamah, *Tradisi dan Akhlak Pengamal Tarekat*, hlm. 235.

²⁸Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 99.

penyelesaian konflik internal partai dikaitkan dengan proses perubahan sosial politik Islam pasca Orde Baru, khususnya periode Pemilu 1999 dan 2004. Fenomena fase perubahan yang sangat penting tersebut telah mengilhami penulis untuk melakukan penelitian yang terfokus pada salah satu simbol ritual keagamaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pejabat, atau penyelesaian konflik elite partai dengan *jama'ah* kaum Nahdliyin di Jawa Barat.

E. Landasan Teori

Sosiologi agama diketahui memiliki intensitas tinggi dalam mempelajari kualitas kegiatan gejala agama-banyak kajian penting mengenai agama dan gejalanya yang berhubungan dengan itu-dipelajari pada masyarakat primitif maupun masyarakat modern.

Sosiologi agama ialah bagian dari sosiologi umum yang mempelajari suatu ilmu budaya empirik, profan, dan positif yang menuju kepada pengetahuan umum yang jernih dan pasti dari struktur, fungsi, dan perubahan kelompok keagamaan dan gejala kekelompokan keagamaannya.²⁹

Hal yang disoroti dalam masyarakat agama adalah struktur, fungsi dan pengaruhnya terhadap masyarakat umumnya dan atas stratifikasi sosial khususnya, terutama mengingat adanya kesadaran dan kohesi kelompok religius yang mempunyai sifat tersendiri. Juga untuk mengkaji perubahan yang disebabkan oleh agama, baik yang positif maupun negatif, seperti kerukunan antar golongan agama dan konflik yang sering terjadi. Demikian juga fenomena jenuhnya organisasi lembaga keagamaan yang tidak selalu membawa kebaikan, bahkan sering

²⁹J. Goddy, *Religion and Ritual: The Definitional Problem* (Britania: J.Sociology, t.t.), hlm. 42.

menghambat laju modernisasi penganutnya.³⁰

Bila dikatakan yang menjadi sasaran dalam masyarakat agama sesungguhnya bukanlah agama sebagai suatu sistem ajaran (dogma dan moral itu sendiri), tetapi agama lebih pada sesuatu yang mampu mengejawantah dalam bentuk kemasyarakatan nyata, atau yang menurut Durkheim, agama sebagai gejala sosial, fakta sosial yang dapat disaksikan serta dialami banyak orang.

Sosiologi agama tidak membuat evaluasi mengenai ajaran dogma dan moral yang diyakini pemeluknya sebagai sesuatu yang berasal dari dunia luar, dunia sakral yang jauh berbeda dengan dunia empirik dan tidak dapat disentuh oleh pengkajian empirik. Hal ini disebabkan atas penilaian bahwa nilai-nilai supra empirik adalah tugas khusus dari teologi dogmatik dan teologi moral, bukan kompetensi dari sosiologi agama. Karena sosiologi agama hanya mengkonstatasi, menyaksikan akibat empirik atas kebenaran supra empirik yang menjadi sasaran langsung dari sosiologi agama, di mana masyarakat agama-nyalah yang menjadi suatu persekutuan hidup dan unsur konstitutif utama dalam agama atau nilai keagamaan.³¹ Apabila teologi mempelajari tentang agama dan masyarakat agama dari pendekatan supra empirik, maka sosiologi agama mempelajarinya dari pendekatan empiris sosiologis. Jadi yang hendak dicari dalam fenomena agama adalah dimensi sosiologisnya, yakni seberapa jauh agama dan nilai-nilai keagamaan memainkan peranan dan berpengaruh atas eksistensi dan operasi masyarakat manusia. Konkritnya, seberapa jauh unsur kepercayaan mempengaruhi pembentukan kepribadian pemeluknya dan ikut mengambil bagian dalam menciptakan jenis kebudayaan, mewarnai dasar dan haluan

³⁰Djamari, *Agama dalam Perspektif Sosiologi* (Bandung: Alfabeta, 1988), hlm. 54.

³¹Emile Durkheim, *Sejarah Agama*, terj. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 433.

negara, memainkan peranan dalam munculnya strata sosial, melahirkan organisasi-organisasi. Juga seberapa jauh agama ikut mempengaruhi proses sosial, perubahan sosial, sekularisasi, fanatisme, bentrokan, dan sebagainya.³²

Sosiologi agama menjadi sub-disiplin ilmu sejak munculnya karya Weber dan Durkheim. Menurut Robertson (1970), salah satu referensi Weber terpenting dalam sosiologi agama adalah sosiologi Marxis. Karl Marx cenderung menganggap dan mencoba menjelaskan bahwa bentuk-bentuk agama tertentu dan doktrin-doktrinnya merupakan refleksi dari infrastruktur sosio ekonomi, terutama hubungan antar kelas.

Dalam karya Marx sendiri, pandangan itu kurang tampak ekstrim seperti karya para pengikutnya, terutama Engels dan Kautsky.³³ Sumbangan Weber pada sosiologi agama adalah mendemonstrasikan kondisi di mana agama merupakan sumber inovasi kreatif di dalam sistem sosial budaya. Dalam *Protestan Ethic and the Spirit of Capitalism*, Weber menunjukkan hubungan Protestanisme, terutama Calvinisme, dengan industri. Nilai-nilai Calvinisme seperti hidup hemat, disiplin diri, dan kerja keras demi pengabdian kepada Tuhan merupakan karakteristik orientasi kapitalistik abad XIX.³⁴

Beberapa ahli sosiologi cenderung memandang kepercayaan dan kegiatan keagamaan sebagai suatu syarat dari sistem sosial, karena merupakan tenaga kuat untuk mengikat orang bersama dan memberikan petunjuk kognitif, evaluatif, dan ekspresi yang mendasar untuk keteraturan tata laksana masyarakat.

³²P.L. Berger, *Kabar dari Langit: Makna Teologi dalam Masyarakat Modern*, terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 125.

³³D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hlm. 109-119.

³⁴R. Robertson, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Drs. Achmad Fedyani Saifudin, MA (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 349.

Tokoh-tokoh yang berpandangan demikian antara lain Talcott Parsons, Kingsley Davis dan Robert N. Bellah di tempat manakala masyarakat mengabaikan agama, seperti masyarakat komunis, maka sistem kepercayaan, organisasi, dan aktivitas yang berasosiasi dengan itu dianggap sebagai keagamaan atau secara struktural dan fungsional sama dengan agama.³⁵ Simbol ritus keagamaan yang dikenal dengan *istighatsah*, sebagai titik tolak penelitian ini merupakan kegiatan keagamaan kaum Nahdliyin di Jawa Barat. Beberapa peristiwa nasional yang terjadi pada pasca Orde Baru, khususnya saat menjelang dan pasca Pemilu 1999 dan 2004, serta beberapa yang bertaraf regional dan lokal di Kawasan Jawa Barat.

Ditinjau dari perspektif sosiologis, khususnya tentang tipologi hubungan Islam dan budaya lokal, juga dalam pandangan teori relasional konflik, penelitian ini lebih menekankan terhadap analisis upaya elite politik kaum Nahdliyin dalam meredam konflik internal-horizontal melalui perhelatan *istighatsah*.

Menurut Heru Purwanto, perubahan suatu lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan, dan perubahan kebudayaan dapat pula terjadi karena mekanisme lain, seperti munculnya penemuan baru atau *invention*, *difusi* dan *akulturasi*. Dengan kebudayaan yang dimilikinya, suatu masyarakat akan mengatur perilaku mereka dalam hubungan dengan lingkungannya, demikian pula dalam interaksi sosial maupun dengan dunia supranatural mereka. Berbagai perubahan sosial dan kebudayaan, bisa berakibat menguntungkan atau merugikan. Suatu perubahan yang terjadi mengharuskan perlunya memodifikasi pola tingkah laku.³⁶

³⁵Robert N. Bellah, *Beyond Belief. Menemukan Kembali Agama*, terj. Ihsan Ali Fauzi (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 168.

³⁶Heru Purwanto, bab IV, "Inonasi dan Dinamika Kebudayaan" dalam buku *Kebudayaan dan Lingkungan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 139-155.

Dalam menghadapi lingkungan fisik, Sahlins (1977) mengatakan, bahwa manusia cenderung mendekatinya melalui budaya yang dimilikinya, yaitu sistem simbol, makna, dan sistem nilai. Rogers M. Kessing (1971) kurang melihat arti penting sistem simbolik yang biasa dipergunakan manusia untuk memecahkan masalah yang mendasarkan kerangka pemikiran mereka.

Menurut Heru Purwanto, menghadapi dunia fisik dan hubungan sosial, manusia tidak hanya menyandarkan diri pada pengetahuan mengenai simbol-simbol budaya yang mereka miliki, tetapi ada kalanya juga mendasarkan atas pertimbangan praktis. Untuk itu diperlukan suatu perspektif teoritis yang dapat menjelaskan kekuatan-kekuatan pembentuk dan penghambat *adaptasi ekologis*, yang di satu pihak memandangnya melalui sistem pemaknaan dan di lain pihak memperhatikan sistem hubungan sosial.³⁷

Menurut Gillin dan Gillin (1954), kelompok dan lembaga sosial adalah bentuk struktural dari masyarakat. Dalam menghadapi situasi tertentu, dinamikanya akan tergantung pada pola-pola perilaku para warganya. Dinamika suatu masyarakat tercermin dalam perkembangan dan perubahan yang terjadi, yaitu sebagai akibat hubungan antar orang, antar kelompok, maupun antar orang-perorangan dengan kelompok-kelompok.

Berbagai bentuk interaksi sosial yang ditandai oleh terjadinya kontak dan komunikasi merupakan aspek penting dalam mempelajari proses-proses sosial. Apabila terjadi suatu perubahan yang menyebabkan goyahnya sendi-sendi kehidupan yang ada, pengetahuan tentang proses-proses sosial dapat dipakai untuk memahami

³⁷*Ibid.*, hlm. 141.

perilaku yang akan muncul.³⁸

Menurut Geertz, kekurangtajaman teori fungsional Malinowski dan Radcliffe-Brown dalam menganalisis perubahan bersumber pada ketidakmampuan para ahlinya memisahkan antara tataran (*level*) sosial (masyarakat, struktur sosial) dari tataran kultural (sistem gagasan, makna dan simbol) dan memandang tataran tersebut pada derajat yang sama. Agar konsep fungsional dapat diterapkan secara efektif untuk membahas perubahan, untuk menganalisis materi yang bersifat historis, sebaiknya dimulai dengan membedakan antara aspek sosial dari aspek kultural kehidupan manusia dan kemudian memandang keduanya sebagai variabel bebas tetapi saling berkait.

Mengutip Parsons dan Shils dalam *Toward a General Theory of Action* (1951), Geertz menegaskan bahwa pembedaan antara kultur dan sistem sosial berarti memperlakukan kultur sebagai sistem makna dan simbol yang terorganisasi yang menjadi dasar interaksi sosial dan memandang sistem sosial sebagai pola-pola interaksi sosial itu sendiri.

Kingsley Davis (1960: 622-623) berpendapat, bahwa perubahan sosial (*social change*) merupakan bagian dari perubahan kebudayaan (*culture change*). Ini berarti bahwa ruang lingkup perubahan kebudayaan jauh lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Suatu *social change* akan muncul apabila perubahan itu terjadi pada struktur dan fungsi-fungsi masyarakat.

Menurut Spiro (1953), dalam ilmu antropologi, pemakaian kata fungsi diartikan untuk menerangkan hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal-hal

³⁸ *Ibid.*

lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Sebagai contoh, perubahan suatu organisme akan menyebabkan pula perubahan pada beberapa bagian organisme lain, dan tidak jarang menyebabkan perubahan pada seluruh bagian organisme tadi.³⁹

Teori perubahan yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser, Ralf Dahrendorf dan Talcott Parsons kiranya dapat dipakai sebagai sistem konseptual yang diharapkan mampu menjelaskan berbagai dinamika dan konflik internal serta berbagai hambatan dan tekanan yang ditimbulkan oleh suatu lingkungan. Konflik dan kontradiksi internal dalam suatu sistem sosial, dalam proses penyesuaian diri pada suatu lingkungan merupakan kekuatan dinamik. Sekalipun konflik merupakan proses disasosiatif yang agak tajam, tetapi sebagai salah satu bentuk proses sosial, konflik memiliki fungsi yang positif atau mempunyai akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik dalam bentuk lunak dapat dikendalikan, suatu konflik dapat membawa sesuatu ke arah yang positif atau sebaliknya, tergantung dari: (1) persoalan yang dipertentangkan dan (2) struktur sosial di mana pertentangan tersebut terjadi. Oleh karena itu, sepanjang pertentangan tersebut tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial dalam struktur sosial tertentu, maka konflik akan bersifat positif. Setelah konflik terjadi, cenderung terjadi penyesuaian norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok yang terlibat konflik, sesuai dengan kebutuhan individu maupun bagian dari kelompok.

Dalam suatu masyarakat dimana frekuensi interaksi sosial di antara para warganya cukup tinggi, maka adanya sikap toleransi yang sudah *institutionalize* akan dapat membatasi akibat negatif dari konflik atau dapat menekan timbulnya suatu

³⁹*Ibid.*, hlm. 143.

konflik. Sekalipun ada benih-benih pertentangan, namun karena telah menjadi kebutuhan umum untuk memelihara hubungan baik, maka benih pertentangan tidak akan dibiarkan berkembang. Jika dibiarkan berkembang, maka akan membahayakan keutuhan kelompok tersebut.

Sebaliknya pada suatu masyarakat di mana frekuensi interaksi sosial di antara para warganya tidak terlalu tinggi, biasanya suatu pertentangan tidak membawa akibat yang negatif. Perhatian para warga masyarakat seperti itu biasanya tidak hanya terpusat pada satu jenis pertentangan saja. Konflik yang terjadi dianggapnya sebagai suatu upaya untuk mengurangi ketegangan dan hanya dibatasi pada pokok persoalan yang menyebabkan timbulnya pertentangan.

Kesimpulan dari uraian di atas menunjukkan, bahwa pertentangan yang terjadi pada suatu masyarakat yang terbuka struktur sosialnya berfungsi untuk memecahkan atau mengurangi ketegangan sehingga akan mampu untuk meningkatkan stabilitas dan integrasi. Sikap yang toleran terhadap terjadinya suatu pertentangan akan dapat berguna untuk mengetahui sumber ketidakpuasan dalam masyarakat sehingga mampu menimbulkan keseimbangan di antara berbagai kekuatan dalam masyarakat. Konflik dianggap sebagai alat untuk menyesuaikan norma-norma dengan keadaan dari kondisi baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada. Biasanya suatu masyarakat memiliki alat-alat tertentu untuk menyalurkan benih permusuhan yang lazim disebut *safety-valve institutions*, berupa obyek tertentu yang dapat mengalihkan perhatian berbagai pihak yang bertikai. Diharapkan, *safety-valve institutions* akan mampu menekan, menyalurkan, atau mentolerir benih konflik sehingga tidak meletus.

Konsep dan teori yang dapat dipakai oleh para ahli ilmu sosial, termasuk di dalamnya ahli antropologi, seperti Lewis A. Coser (1973: 114) mengatakan, bahwa jika terjadi suatu konflik (sosial) maka pada hakikatnya konflik itu mengandung arti fungsional, terutama untuk melihat proses perubahan sosial yang sedang terjadi. Guna memahaminya, maka teori fungsional tentang perubahan yang dikembangkan oleh Talcott Parsons (1973) dapat dipakai untuk mengkaji keterkaitan suatu konflik dengan fungsi dari suatu stabilitas atau *ekuilibrium*. Selain itu, kiranya teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf dapat pula dipakai, terutama bila ingin dikaitkan dengan keadaan suatu struktur sosial tertentu.⁴⁰

Dikemukakan oleh Dahrendorf (1973), bahwa dari pengalaman yang terjadi, sebenarnya dalam masyarakat yang sedang mengalami konflik itu memiliki aspek ganda atau mengandung dialektika. Untuk itu, model suatu komunitas yang ditawarkan oleh R. Dahrendorf adalah sebagai berikut. *Pertama*, bahwa setiap komunitas itu secara relatif terdiri dari konfigurasi unsur-unsur. *Kedua*, bahwa setiap unsur yang ada dalam suatu komunitas adalah terintegrasi dengan baik. *Ketiga*, bahwa setiap unsur tersebut memberikan kontribusi fungsional. *Keempat*, bahwa setiap warga masyarakat tunduk pada konsensus yang telah disepakatinya.

Berdasarkan model komunitas tersebut, dapat menunjukkan empat hal. *Pertama*, bahwa setiap komunitas itu merupakan subjek dari suatu perubahan karena perubahan dapat terjadi di mana pun. *Kedua*, bahwa setiap komunitas pernah mengalami konflik, karena konflik terdapat di mana pun. *Ketiga*, setiap unsur yang ada dalam suatu komunitas memiliki kontribusi yang sama untuk berubah. *Keempat*,

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 146.

setiap anggota masyarakat menyadari bahwa di antara mereka saling memiliki perbedaan pandangan.

Tahapan *dichotomy*, menurut R. Dahrendorft, yang memakai pengandaian berupa *imperatively coordinated group*, berasal dari konsep Weber. Dalam konsepsi Weber, di mana pun dalam kehidupan bersama umat manusia, selalu diwadahi dalam suatu organisasi sosial. Dalam suatu organisasi sosial, selalu akan dijumpai suatu posisi tertentu bagi yang memiliki kekuasaan atau yang diberi suatu wewenang. Ada kemungkinan model tersebut dapat dipakai guna mencari asal-mula suatu konflik, terutama yang dikaitkan dengan berbagai hubungan kekuasaan melalui unit-unit tertentu dalam suatu organisasi sosial.

Dalam pengembangan teorinya, R. Dahrendorft mengajukan model konsep berpikir sebagai berikut. *Pertama*, bahwa dalam setiap *imperatively coordinated group* terdapat pemeran kekuasaan positif dan negatif, dan masing-masing mewakili dua kelompok kuasi (*quasi group*) dengan masing-masing kepentingan yang berbeda dan saling berlawanan. Pihak yang memiliki peranan positif cenderung ingin mempertahankan *status quo*, sebaliknya pihak yang memiliki peranan negatif cenderung ingin merubah *status quo*.

Kedua, pihak yang memiliki peranan positif maupun negatif merupakan anggota kuasi yang saling berlawanan dan keduanya terorganisasi ke dalam kelompok-kelompok yang saling memiliki kepentingan. *Ketiga*, pada mulanya konflik yang terjadi berkaitan dengan permasalahan apakah sesuatu itu harus dijaga atau diubah dari suatu keadaan *status quo*, dan bentuk serta intensitas dari suatu konflik tergantung pada variabel kondisi empirik atau kondisi suatu konflik.

Keempat, biasanya bila terjadi konflik di kalangan kelompok *interest* maka akan dapat merubah struktur hubungan sosial, yaitu melalui dominasi. Bentuk, kecepatan dan intensitas berkembangnya suatu perubahan tergantung pada variabel empirik atau dapat pula tergantung dari berbagai kondisi perubahan struktural yang ada.

Teori konflik yang diusulkan oleh R. Dahrendorft tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan mengenai: (1) bentuk-bentuk struktur sosial suatu komunitas yang dapat memunculkan kelompok yang saling terlihat konflik, (2) bentuk-bentuk perjuangan yang diinginkan oleh mereka yang saling terlibat konflik, serta (3) sejauh manakah pengaruh konflik yang ditimbulkan terhadap suatu perubahan struktur sosial.⁴¹

Selanjutnya, penggunaan model teori konflik R. Dahrendorft dikembangkan lagi dengan mengkaitkannya antara konflik sosial dengan perubahan sosial dari Lewis A. Coser (1973:114-122). Dalam rangka mengembangkan teorinya, Coser bertitik tolak dan suatu anggapan bahwa apabila terjadi suatu konflik sosial, maka sebenarnya konflik tersebut erat berkaitan dengan masalah derajat kekakuan dari suatu kelembagaan.

Lebih lanjut Lewis A. Coser mengatakan bahwa tidak semua sistem sosial mengandung derajat ketegangan konflik yang sama. Sumber dan cakupan luasnya suatu konflik selalu berubah-ubah yang semua tergantung dari tipe struktur sosial dan pola-pola mobilitas sosial. Apakah berbagai bentuk konflik yang terjadi dapat berfungsi dan mengakibatkan perubahan terhadap suatu sistem sosial lama ke arah

⁴¹*Ibid.*, hlm. 146-149.

terbentuknya suatu sistem sosial baru adalah sangat tergantung pada derajat kekakuan dan tingkat resistensi sistem sosial itu sendiri. Dengan kata lain, tergantung pada tingkat elastisitas mekanisme kontrol dari suatu sistem sosial.

Akhirnya Lewis A. Coser juga berpendapat, bahwa jika suatu komunitas itu terintegrasi dengan baik, ada kecenderungan memiliki toleransi atau bahkan membiarkan terjadinya suatu konflik. Sebaliknya apabila komunitas tersebut lemah derajat integrasinya, maka biasanya cenderung bersikap berhati-hati terhadap kemungkinan munculnya suatu konflik.⁴²

Untuk lebih memahami mengapa suatu perubahan harus terjadi, pokok pemikiran Talcott Parsons (1973: 72-86), yaitu mengenai fungsi dari suatu perubahan; kiranya dapat dipakai guna lebih memahami terjadinya suatu perubahan. Menurut Parsons, apabila terdapat perubahan, pada gilirannya akan terjadi pula serangkaian upaya untuk menjaga terciptanya keseimbangan, antara lain melalui usaha-usaha mengeliminasi berbagai sumber konflik.

Berdasarkan kerangka berpikir Parsons, ia memulainya dari konsep pangkal mengenai stabilitas atau ekuilibrium yang dinilainya sebagai ciri utama dari suatu struktur sosial. Selanjutnya yang harus dilakukan pertama kali adalah memperjelas pemakaian konsep struktur, yaitu: (1) yang menunjuk pada ciri dari suatu sistem, baik secara menyeluruh maupun dalam bentuk sub-sub sistem dalam suatu sistem, (2) dalam istilah struktur terkandung pengertian keseimbangan yang stabil, yaitu dalam arti statis (*static*) tetapi juga bergerak (*moving*).

⁴²*Ibid.*, hlm. 149-153.

Pada hakikatnya, suatu sistem berada pada keadaan stabil/relatif seimbang, terutama jika terjadi hubungan antar struktur dan berbagai proses yang berlangsung dalam suatu sistem. Apabila terjadi hubungan antara sistem dan lingkungannya biasanya cenderung menjaga sifat-sifat yang mampu menyeimbangkan.

Keadaan hubungan seperti itu seharusnya diartikan secara relatif, bahwa suatu struktur adalah tidak berubah. Sementara dalam kenyataannya, suatu sistem adalah dalam keadaan dinamis, dinamika suatu sistem sangat tergantung dari kontinuitas berbagai proses yang mampu menetralkan berbagai sumber daya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar komunitas tersebut. Jika hal itu berlangsung cukup lama, selanjutnya akan mengubah suatu struktur disebabkan suatu proses stabilitas (*stability*) maupun proses penyeimbangan (*equilibrating*) yang pada hakikatnya mengandung arti berlawanan dengan istilah *proseses* yang biasanya dipakai dalam konteks arti perubahan struktur.

Lebih lanjut Parsons menjelaskan, bahwa untuk memahami suatu struktur sosial, dapat diketahui secara formal maupun substantif. Secara formal, suatu struktur merupakan salah satu dari beberapa sistem empirik yang dapat diruntut melalui: (1) unit-unit seperti halnya partikel atau sel, dan (2) hubungan-hubungan terpola di antara unit-unit itu seperti tampak dalam hubungan suatu organisasi, hubungan antar jaringan dan hubungan antar organ dalam tubuh manusia.

Setiap unit dalam suatu sistem sosial memiliki peranan yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau aktor, dan peran serta dari anggotanya erat kaitannya dengan peranan dan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Berbagai hubungan yang ada dalam suatu sistem struktur, paling tidak berupa interaksi yang berpola-

pola; dalam arti bahwa setiap pemeran berfungsi sebagai aktor terhadap lainnya, demikian pula sebaliknya.

Dalam suatu struktur sosial, hubungan berpola adalah bagian dari unsur normatif. Berbagai unsur normatif tadi berasal dari berbagai pandangan yang tercakup dalam suatu kesatuan pandangan, misalnya mengenai harapan yang melekat dalam diri seseorang atau yang tercermin dalam perilaku anggota komunitas tersebut.

Selanjutnya jika dilihat lebih lanjut bahwa harapan tersebut adalah didasarkan atas suatu pertanyaan apakah tindakan mereka itu sesuai atau benar, demikian pula sebaliknya. Sementara itu di sisi lain dalam suatu kesatuan yang saling terlibat interaksi, terdapat standar sanksi yang telah dilegitimasi. Sanksi tersebut dapat ditafsirkan positif dan dapat pula ditafsirkan sebaliknya. Semua penafsiran atas sanksi itu tergantung dari sudut pandang kesatuan acuan tertentu. Sebagai contoh dari hal tersebut adalah apabila ada perbedaan yang menyangkut kepentingan semua kolektiva. Masing-masing anggota akan memberikan pandangan mereka yang mengacu pada suatu nilai tertentu, atau norma dan pola-pola hubungan tertentu sesuai dengan peranan mereka dalam kolektiva sosial tersebut.⁴³

Oleh karena itu, penelitian terhadap aspek ritus keagamaan tentang *istighatsah* sangat penting untuk ditemukan fungsinya dalam menetralkan konflik dan integrasi serta pengaruhnya terhadap perubahan sosial, politik dan keagamaan. Kaum Nahdliyin sebagai sasaran penelitian yang hidup di Jawa Barat, melengkapi usaha penelitian ini dalam mempelajari tentang makna dan fungsi *istighatsah* bagi para pelakunya. Bertitik tolak dari fenomena tersebut, kerangka teoritik tentang makna

⁴³*Ibid.*, hlm. 153-155.

dan fungsi dalam *istighatsah* ini diketahui dapat meningkatkan solidaritas dan *Ukhuwwah Islamiyyah* yang berpotensi mendorong progresivitas perubahan sosial, politik, dan keagamaan dalam masyarakat.

Fenomena ritual keagamaan yang ada dalam suatu masyarakat menunjukkan diferensiasi (keragaman) sosial. Gejala ini muncul karena adanya otonomisasi individu-individu dalam masyarakat, sedang individu-individunya sendiri mempunyai kemampuan, keinginan, dan kemauan yang berbeda, di samping ciri-ciri fisik yang juga berbeda, termasuk organisasi dan kerumunan yang dijadikan acuan mereka dalam berkumpul. Karena diferensiasi inilah kemudian muncul interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang berbeda-beda, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Interaksi individu-individu yang terorganisasi sebagai suatu sistem interaksi adalah suatu unit dalam sistem sosial.⁴⁴

Terorganisasinya interaksi individu-individu itu menunjukkan adanya peranan individu-individu yang berbeda dalam berinteraksi, yang pada gilirannya membentuk organisasi sosial. Sebagai perwujudannya, dalam setiap masyarakat secara wajar timbullah dua kelompok yang berbeda peran sosialnya, yaitu yang memimpin sebagai golongan kecil yang terpilih, dan kelompok yang dipimpin (pengikut) ialah orang kebanyakan.⁴⁵ Rumusan tersebut dapat mengungkapkan fenomena ritual keagamaan yang terdapat pada organisasi sosial keagamaan Nahdhatul 'Ulama (NU) yang berasal dari jaringan agama dan tradisi.

⁴⁴Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 26-35.

⁴⁵Ann Ruth Willner dan Dorothy Willner, "Kebangkitan dan Peranan Pemimpin-pemimpin Kharismatik" dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 165-184.

Organisasi dimaksud adalah ikatan kaum Nahdliyin di Jawa Barat yang biasa melakukan ritual *istighatsah*. Posisi ulama di kalangan kaum Nahdliyin selalu menjadi pihak yang menguntungkan sebagai pihak yang memimpin, dibanding dengan pihak yang dipimpin (pengikut atau jama'ah). Karena secara hierarki, ini tergambar adanya implikasi hubungan (relasi) antara yang memimpin dan yang dipimpin (pengikut) dengan ciri-ciri kewibawaan dan kepatuhan, keunggulan (di atas) dan kekurangan (di bawah), sementara perbedaan itu sendiri secara sederhana terdapat dalam status kekuasaan.

Sebenarnya paradigma kekuasaan mengandung unsur bangunan integrasi dalam model sistem politik untuk teori tindakan dalam kehidupan sosial.⁴⁶ Status kekuasaan yang inti ini dirumuskan sebagai “kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah-laku pelaku lain, sehingga tingkah-laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan”.⁴⁷ Kewibawaan (*authority*) dan keunggulan (*superiority*) ini cenderung tetap dipertahankan oleh pihak elite pemimpin, karena dengan implikasi itulah mereka dapat mempertahankan kedudukannya. Jika kelestarian kedudukan elite itu ditempatkan sebagai suatu yang dibutuhkan, maka (*authority*) dan (*superiority*) pun merupakan suatu kebutuhan yang selalu diupayakan pemenuhannya.⁴⁸

Dengan asumsi seperti itu, corak keberagaman yang masuk ke Nusantara pada masa itu, mempunyai kekuatan akumulatif-akulturatif yang luar biasa. Sudah barang tentu perlu dikaji secara mendalam. Selanjutnya bisa dikatakan pula bahwa

⁴⁶A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 103-125.

⁴⁷Miriam Budiardjo, “Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan” dalam Miriam Budiardjo (ed.), *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 9.

⁴⁸C. Wright Mills, *The Power Elite* (Oxford New York: University Press, 1959), hlm. 269.

corak spiritualitas dan moralitas di Indonesia pada saat ini mempunyai akar masa lampau yang amat dalam dan amat sulit dipisahkan.⁴⁹

Dalam perspektif Nahdhatul ‘Ulama, orientasi politik, sosial, dan keagamaan tidak dapat dihindari, karena alasan agama yang dianut sebagai dasar organisasi yang ajarannya meliputi soal-soal ukhrawi dan duniawi. Jika kaum NU sebagai masyarakat politik, maka penelitian ini akan menemukan (a) hasil pengamatan tentang sistem simbol keagamaan yang paling efektif dalam penggalangan massa dalam meredam konflik, (b) mengamati sistem simbol tersebut dalam hubungannya dengan lingkungannya, baik lingkungan yang hidup maupun yang tidak hidup, (c) mempelajari pengaruh suatu pembaharuan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan itu (d) menganalisa sistem tersebut, terutama strukturnya yang bersifat menyatukan (*integratif*) dan mengatur (*direktif*).⁵⁰

Seperti diungkapkan Irwan Abdullah,⁵¹ budaya generik merupakan *blue print* bagi tingkah laku. Geertz menganggap, ini bisa dilihat bedanya dengan definisi kebudayaan yang cenderung menekankan “budaya diferensial” yang menunjuk pada ciri-ciri suatu kelompok masyarakat. Ciri-ciri ini pun dapat dilihat pada sistem ekologis, ekonomi, struktur sosial, dan ideologis yang terkait dengan proses evolusi yang dinamis.⁵²

Berdasarkan anggapan bahwa kebudayaan adalah hal yang semiotik dan kontekstual, Geertz menawarkan cara menafsir simbol-simbol kebudayaan secara

⁴⁹M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural; Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 188.

⁵⁰S.P. Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 39.

⁵¹Irwan Abdullah, “Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan” dalam Hans Daeng (ed.), *Manusia dan Kebudayaan Tinjauan Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. vi.

⁵²*Ibid.*

lengkap. Sebuah tafsiran dengan memaparkan konfigurasi atau simbol bermakna secara mendalam dan menyeluruh. Mengingat bahwa simbol budaya adalah kendaraan pembawa makna. Seperti juga Kluckholm, menyebutnya sebagai *the rehidle of culture*. Kesimpulan bahwa selama ini sistem simbol yang tersedia pada kehidupan suatu masyarakat, sesungguhnya menunjukkan bagaimana warga masyarakat tersebut melihat, merasa, dan berpikir tentang dunia mereka dan bertindak berdasar nilai-nilai yang sesuai.

Melihat dimensi simbolik dari tindakan sosial, seni, agama, ideologi, ilmu pengetahuan, hukum, moralitas, dan akal sehat, maka hendaknya ditempatkan dalam kerangka yang bermakna dan dapat dipahami, bukan berpaling dari dilema kehidupan yang bersifat eksistensial ke bidang kelembagaan tertentu.

Dari pemaparan Geertz itu, dapat dikaitkan dengan uraian mengenai budaya struktural dan struktural fungsional bahwa lingkungan manusia membatasi pilihannya dan aneka lingkungan itu bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda.

Merton juga melihat pengaruh lembaga (struktur) terhadap perilaku seseorang yang mengemukakan bahwa struktural yang bertanggung jawab atas perilaku seseorang. Salah satu contoh ulasanya tentang dampak lembaga (struktur) terhadap kehidupan anggotanya tampak dalam buku *Social Structure and Anomie* (1938). Merton melihat, bagaimana sejumlah struktur sosial memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu sehingga mereka lebih menunjukkan kelakuan non-konformis ketimbang konformis. Merton menegaskan bahwa ada tiga postulat dalam budaya fungsionalnya:

1. *Kesatuan fungsional masyarakat* yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan yang seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Agama dilihat sebagai suatu unsur penting dalam masyarakat, yang mampu mempertinggi tingkat kohesi suatu masyarakat, tetapi agama juga memiliki konsekuensi disintegrasi. Ia juga menjelaskan dan menegaskan bahwa unsur disintegrasi (*disfungsi*) tidak boleh diabaikan, di samping adanya fungsi yang positif (*elemen integratif*). Ia juga menyatakan bahwa apa yang terkadang fungsional bagi suatu kelompok tertentu dapat menjadi tidak fungsional bagi keseluruhan.
2. *Postulat fungsionalisme universal*, yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi positif. Meskipun ada beberapa perilaku sosial bersifat disfungsional, menurutnya agar unsur budaya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi fungsional yang menimbang fungsi positif terhadap fungsi negatif.
3. *Postulat indispensability*, yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Penilaian fungsionalitasnya harus dilihat dalam konteks keseimbangan konsekuensi. Menurut Merton, fungsi itu ada dua macam. *Pertama*, fungsi manifes, merupakan konsekuensi objektif yang membantu penyesuaian atau adaptasi dari sistem dan didasari oleh partisipasi. *Kedua*, fungsi laten, merupakan

fungsi yang tidak dimaksudkan atau tidak disadari. Hendaknya fungsi laten jangan diabaikan. Jadi setiap praktek kebudayaan dapat dianalisis dari perspektif fungsi laten dan manifes. Paradigma yang akan mengarahkan para analis fungsionalisme, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam analisisnya tentang:

- a. Bagaimana hakekat sistem yang sedang dianalisis, apakah suatu kelompok etnik atau kelompok kecil atau suatu organisasi yang lebih besar. Mengapa? Karena sesuatu yang fungsional bagi suatu kelompok belum tentu fungsional bagi kelompok yang lain.
- b. Untuk mencapai konsekuensi keseimbangan, harus dipertimbangkan fungsi manifes maupun fungsi laten.
- c. Perlu memperhatikan alternatif fungsional, dalam menentukan persyaratan fungsional harus ada dalam suatu sistem tertentu.
- d. Apakah minat penganalisis terhadap isu tentang keteraturan (*order*) akan merintang kemampuan mereka untuk melihat ketidakseimbangan.

Menurut Merton, struktur sosial yang terintegrasi dan norma-norma yang ada mengendalikan para anggota mereka. Sedangkan Talcott Parsons menegaskan, bahwa ada tiga dasar pendekatan fungsional: (1) apa yang membuat masyarakat bersatu dan persyaratan fungsional apa yang harus dipenuhi, (2) bagaimana landasan keteraturan sosial itu dipertahankan, dan (3) bagaimana tindakan individu itu menyumbang pada masyarakat atau bagaimana fungsi itu dipenuhi. Kesemuanya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.⁵³

⁵³Irwan Abdullah, "Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan", hlm. 157-159.

Analisis budaya fungsional memberikan suatu kerangka untuk melihat dilema kebijakan sosial, meskipun budaya fungsionalisme merupakan suatu perspektif yang abstrak dan sangat umum. Adapun hal yang bisa dianalisis secara kerangka budaya fungsional adalah setiap pola perilaku, baik yang sesuai maupun yang menyimpang, setiap kebiasaan atau norma, setiap kebijakan, dan setiap nilai budaya. Analisisnya berdasarkan konsekuensi sosial umumnya dinilai akan menyumbang atau merusak pada kesejahteraan ataupun daya tahan masyarakat.

Parsons membahas hubungan antara kepribadian individual, sistem sosial, dan sistem budaya. Tekanan dan fungsionalismenya adalah pada persyaratan yang harus dipenuhi supaya suatu sistem sosial bertahan dan bukan pada kebutuhan individual. Perhatian utama diberikan pada pola institusional yang luas dan hubungan yang kompleks antara institusi sosial. Perilaku individu terbentuk oleh pola institusional melalui pelbagai mekanisme sosialisasi dan kontrol sosial.⁵⁴ Budaya fungsional ini memberikan prioritas pada masyarakat. Masyarakat mendahului individu, dan individu dibentuk dan dicetak sebagai yang memiliki kepribadian sosial menurut lingkungan sosialnya. Kepentingan individu mencerminkan kesadaran kolektif atau sistem nilai masyarakat itu pada umumnya.

Analisis budaya fungsional juga relevan dengan suatu pemahaman akan proses perubahan sosial, khususnya perubahan yang teratur, tujuannya untuk memahami keteraturan sosial atau untuk membahas perubahan sosial. Analisis budaya fungsional adalah bagaimana bekerjanya suatu sistem sosial yang sedang berlangsung dan bukan mengenai munculnya atau perkembangannya. Hal ini akan

⁵⁴Talcott Parsons, *The Social System*, hlm. 26-35.

tampak dalam model teori Parsons mengenai sistem sosial. Secara konsisten Parsons melihat kenyataan sosial dari suatu perspektif yang sangat luas, tidak terbatas pada tingkat struktur sosial saja, sehingga sistem-sistem sosial terbentuk dari tindakan-tindakan sosial individu. Parsons mengemukakan, ada empat struktur institusional yang perlu dalam masyarakat:

1. *Struktur Kekerabatan*. Struktur ini berhubungan dengan pengaturan ungkapan perasaan seksual, pemeliharaan dan pendidikan.
2. *Struktur Prestasi Instrumental dan Stratifikasi*. Struktur ini menyalurkan semangat dorong individu dalam memenuhi tugas untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai yang diartur bersama. Suatu strategi pokok untuk menjamin motivasi adalah memberikan penghargaan kepada orang sesuai dengan sumbangannya. Karena itu, Parsons menghubungkan sistem stratifikasi dengan prestasi dan bersifat instrumental. Dalam masyarakat modern, struktur okupasional menyalurkan kegiatan prestasi instrumental, seperti penyebaran uang, prestise dan kekuasaan.
3. *Teritorialitas, kekuatan dan integrasi dalam sistem kekuasaan*. Semua masyarakat harus memiliki bentuk organisasi teritorial yang berfungsi untuk mengontrol konflik internal dan untuk berhubungan dengan masyarakat lainnya.
4. *Agama dan Nilai Integrasi*. Secara tradisional, agama memberikan kerangka arti simbolis yang bersifat umum. Karena itu, suatu sistem nilai akan memperoleh makna akhir atau mutlak. Dengan kata lain, pandangan dunia yang mendasar dalam masyarakat berkaitan dengan struktur agamanya.⁵⁵

⁵⁵Doyle Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M. Z. Lawang, Jilid II (Jakarta: UI-Press), 1986), hlm. 126.

Sekilas tentang timbulnya kaum Nahdliyin di Jawa Barat, bermula dari perluasan syiar organisasi NU di kalangan masyarakat, terutama kaum santri. Sebelum Nahdhatul ‘Ulama didirikan sebagai suatu organisasi, para alim ulama telah lama berperan sebagai pembimbing umat menuju tercapainya *Izzul Islam wal Muslimin*.⁵⁶ Mereka memberi pelajaran agama pada masyarakat, mendidik guru-guru agama untuk melanjutkan bakti mereka kepada generasi berikutnya, baik melalui pesantren, tabligh, dan sebagainya. Peranan mereka yang besar terhadap pembinaan kehidupan Islam telah dimulai jauh sebelum NU didirikan. Dalam pertemuan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 berhasil disepakati sebagai kebangkitan para ‘ulama.

Penelitian tentang kaum Nahdhatul Ulama dalam perspektif sosiologis pada kaum Nahdliyin di Jawa Barat, dikaitkan dengan proses institusionalisasi yang normanya bersumber dari ajaran agama, dalam hal ini bersumber dari ajaran Islam, konsep-konsep ritus itu perlu dijelaskan sehingga dapat didefinisikan dengan jelas. Konsep ritus yang dimaksud adalah perintah untuk melakukan do’a, sesuai dengan Q.S. al-Mu’minun, (23): 60, bahwa perintah tersebut adalah “*Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina-dina*”.

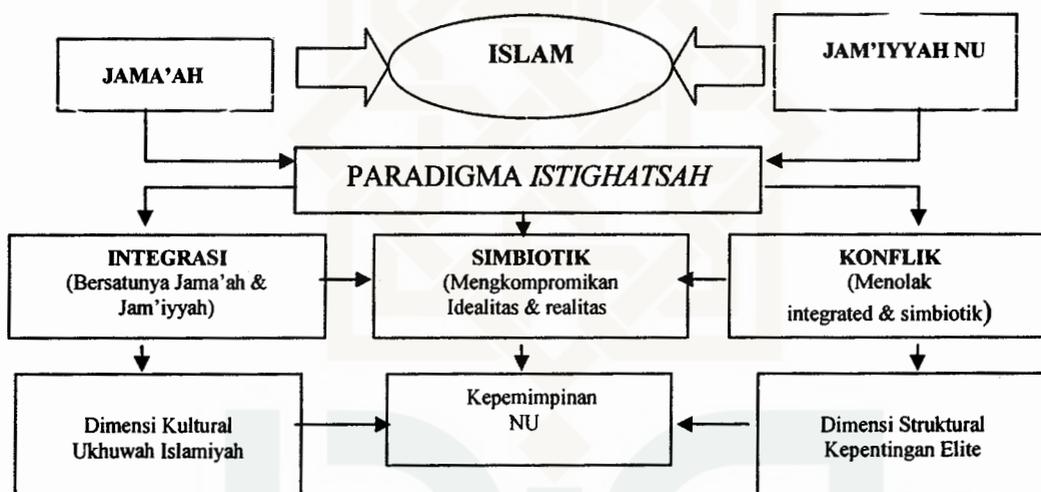
Konsep tentang ritus, pada awalnya merupakan bagian dari ajaran agama, tetapi kemudian berbaur dengan kehidupan sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat. Lalu terjadilah asimilasi, kalau tidak

⁵⁶Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Bentuk, Isi, Makna*, terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 74. Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, terj. Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtiar (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 233.

dikatakan sebagai sinkritisme, yang pada akhirnya pelembagaan itu lahir menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang bersumber dari ajaran agama. Dalam konteks hukum Islam, pelembagaan menjadi tradisi itu tampaknya selaras dengan kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* (adat kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi hukum).

Secara sederhana, alur pikir penelitian ini digambarkan dalam bagan yang tersusun berikut ini:

Gambar 1: Alur Pikir Penelitian



Alur pikir tentang masalah penelitian tersebut berkaitan dengan konsep dan teori intra-budaya dalam mengungkap kaum Nahdhiyin di Jawa Barat, yang menjadi dasar rujukan bagi pemahaman dan analisis data penelitian. Pemilihan konsep ini didasarkan pada dua asumsi. *Pertama*, bahwa interaksi kaum Nahdhiyin Jawa Barat, lebih banyak berlangsung dalam suasana tatap muka, dalam suatu tahapan kehidupan yang alami dan dalam lingkup antar individu dan kelompok. Kaum Nahdhiyin memiliki pola kepemimpinan yang bercorak tradisional dan anggota masyarakat pengikutnya kebanyakan kaum tani, pedagang, pegawai, dan guru agama, maka tampak terjadi pendekatan fungsi yang memungkinkan adanya perbedaan kualitas

dan kemampuan dalam menguasai *istighatsah*. Tetapi dalam hal pemaknaan bisa terjadi ada kesamaan, baik pemahaman maupun dalam melaksanakan aturan. *Kedua*, secara metodologis, penelitian ini menekankan aspek ritus keagamaan yang mengandung muatan nilai moral dan etik dari pelaksanaan kegiatan *istighatsah* itu. Dalam konteks sosial politik, *istighatsah* dipercayai memiliki kekuatan moral yang terkandung di dalamnya kekuatan ghaib yang belum diketahui secara mendalam. Kajian sosiologis ini mengarahkan pada pertanyaan, apa saja yang menjadi faktor utama mendorong munculnya ritus *istighatsah* secara massal pada kaum Nahdliyin Jawa Barat, dan mengapa ritual itu masih tetap dipertahankan.

Di sini terdapat asumsi, bahwa konsep dan pendekatan yang bisa melahirkan pemahaman baru dan analisis terhadap masalah penelitian ini adalah:

1. *Istighatsah* dipahami melalui: (a) pendekatan tradisional, (b) faktor pemimpin dan pengikut, serta (c) karakter kaum Nahdliyin.
2. Pemanfaatan do'a, secara substantif bisa dipahami melalui: (a) pendekatan filosofis, (b) pendekatan agama, dan (c) pendekatan tradisi.
3. Seluruh ungkapan yang tertuang dalam penelitian ini dipahami melalui pendekatan empirik yang relevan dengan penelitian sosiologis.

Dengan demikian, pemahaman baru terhadap ritus *istighatsah* dapat dipandang sebagai persoalan sosial yang mengakses berbagai keadaan, antara lain politik, sosial, ekonomi, dan agama, baik secara struktural maupun kultural, yang pada gilirannya akan berakibat terhadap perkembangan wawasan masyarakat terhadap satu pemahaman baru dari wacana keagamaan.

Asumsi tersebut menguatkan pada pandangan, bahwa kaum Nahdliyin sebagai pengemban ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* di bawah asuhan dan bimbingan organisasi NU. Kaum Nahdliyin diketahui telah mempertahankan tradisi berdo'a bersama melalui *istighatsah* yang tampak telah mendarah-daging atau taat melaksanakannya sehingga seperti "semi-ritual". Oleh karena itu, melalui kerangka ini, dimaksudkan membuat kajian secara terukur dalam sebuah studi disertasi yang dikaji peneliti.

F. Metode Penelitian

1. Strategi Penelitian

Strategi penelitian tentang *istighatsah* dalam masyarakat muslim NU di Jawa Barat, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.⁵⁷ Dengan metode deskriptif, yaitu metode yang diarahkan untuk memaparkan atau menggambarkan apa tujuan, makna, dan fungsi *istighatsah* yang dilakukan kaum Nahdliyin di Jawa Barat.

Adapun pendekatan deskriptif kualitatif pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian seksama tentang bagaimana konsep, pandangan, dan implementasi *istighatsah* bagi kaum Nahdliyin di Jawa Barat. Dengan demikian secara deskriptif diharapkan akan terungkap aspek-aspek yang selama ini tidak tercermati dalam pentas kehidupan nyata. Karenanya tujuan penelitian ini ialah berupaya mengungkap aktivitas kaum Nahdliyin hingga akhirnya memperoleh gambaran nyata dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di tempat yang berbeda di Jawa Barat tersebut. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini

⁵⁷Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 57.

dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang mengacu pada beberapa asumsi berkenaan dengan konsep sosiologi dan antropologi agama.

Konsep-konsep dalam sosiologi agama dapat dijadikan suatu pendekatan dan alat analisis terhadap kajian unsur kebudayaan Islam dan fokusnya pada budaya Sunda. Dalam teropong sosiologi agama, setiap kebudayaan minimal memiliki tujuh unsur kebudayaan (*seven categories of culture*), yaitu bahasa, kesenian, kepercayaan, sistem pengetahuan, sistem peralatan, organisasi sosial, dan sistem mata pencaharian. Dari ketujuh unsur lalu diuraikan kembali berdasarkan pembagian tiga wujud kebudayaan, yaitu wujud gagasan (norma, nilai, aturan, adat istiadat), wujud aktivitas, dan wujud fisik (hasil karya).⁵⁸ Maka hasilnya nanti akan jelas, mana dari unsur kebudayaan lokal (Sunda) dan mana dari unsur kebudayaan “Islam”. Sebagai contoh, dari segi bahasa yang berlaku di Sunda, mana aspek lokalnya dan mana aspek “Islam” bagi segi aturan, cara bicara maupun bentuk tulisan. Begitu pula pada kesenian, kepercayaan, sistem sosial dan pengetahuan, peralatan, dan seterusnya.

Langkah-langkah penelitian tentang *istighatsah* di lingkungan kaum Nahdliyin Jawa Barat yang memakai metode deskriptif kualitatif ini dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta, di samping perumusan teori yang akan dijadikan kerangka acuan. Semua fakta yang telah terkumpul dianalisis dengan cara diklasifikasi dan dikategorisasi, dicari persamaan dan perbedaannya, lalu dikelompokkan, setelah itu diverifikasi oleh teori-teori yang ada kemudian dicarikan koherensinya. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini yang dipentingkan adalah nilai informasinya. Karena itu, sepanjang informasinya belum lengkap bisa dianggap penelitian perlu

⁵⁸Baca Irwan Abdullah, “Dari *Bounded System* ke *Borderless Society*: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini” dalam *Antropologi Indonesia*, Th. XXIII, No. 60, Sep-Des 1999, hlm. 11-18.

terus disempurnakan.

Penelitian ini tidak memiliki metodologi yang rumit seperti penelitian yang lainnya. Metodologinya lebih ditekankan kepada kemampuan peneliti untuk mencari data di lapangan yang memakai teknik wawancara mendalam dan observasi terlibat dan menganalisis data setelah data pertama diperoleh. Berbeda dengan peneliti lain (*kuantitatif*), peneliti membuat alat pengumpul data berupa kuisisioner yang pengumpulan datanya bisa oleh bukan peneliti sebab analisis data dilakukan setelah pengumpulan data itu selesai.⁵⁹

2. Metode yang Digunakan

Mencermati fenomena kaum Nahdliyin Jawa Barat tidaklah berbeda dari masyarakat lain, mereka memiliki kebudayaan kompleks sebagaimana masyarakat lain. Krisis yang dihadapinya pun hampir banyak persamaannya dibandingkan dengan perbedaannya. Isu-isu sosial, politik, ekonomi, keagamaan, militer, gender, lingkungan, ilmu-ilmu social, dan *humanities* kontemporer pasca-modern, hampir kurang tersentuh dari kajian keislaman di tanah air, khususnya Jawa Barat. Para pakar dari berbagai disiplin ilmu banyak mengungkapkan perlunya mempelajari Islam dari sisi tradisi keilmuan di luar ilmu-ilmu keislaman dalam berbagai perspektif tidak hanya mendekati aspek normativitasnya saja.

⁵⁹Beberapa literatur yang menarik untuk dijadikan rujukan pendekatan lain studi Islam kontemporer di antaranya M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006); Brian Morris, *Antropologi Agama* (Yogyakarta: AK Group, 2005); Djam'annuri, *Studi Agama-agama: Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2003); Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, terj. Dr. A. Sudiardja, et.al (Yogyakarta: Kanisius, 1995); Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 2002); Richar C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama* (Malang: Muhammadiyah University Press, 2001); juga Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, terj. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Kalam, 2001).

Dengan bekal sikap skeptis penulis sedikit memahami pendekatan alternatif kehidupan sosio-religius masyarakat Islam sambil mencari pemahaman alternatif tentang hakekat dan dinamika Islam kaum Nahdliyin Jawa Barat dalam mengangkat manifestasi Islam dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Meskipun demikian, kontak dan ketegangan kreatif Islam dalam perspektif normativitas dan historisitas, menurut M. Amin Abdullah, lambat laun tetapi pasti akan menemukan titik temunya, di mana studi Islam dalam berbagai pendekatan memperoleh manfaat besar dari perkembangan metodologi yang bervariasi.⁶⁰

Dalam penelitian ini digunakan metode *deskriptif kualitatif* yang diarahkan pada pendekatan sosiologis. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Tylor,⁶¹ Garna⁶² dan Moleong,⁶³ sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Sebagaimana fokus penelitian ini adalah antara lain tentang sejauh mana dampak *istighatsah* yang dilaksanakan secara organisasi sosial, politik atau institusi pemerintahan, khususnya di lingkungan kaum Nahdliyin Jawa Barat sampai sekarang masih dipertahankan. Penggunaan metode seperti ini adalah mengacu pada pendapatnya S. Nasution,⁶⁴ tentang aplikasi etnografi dalam penelitian sosiologi.

Penelitian tentang kajian yang bersifat tradisional juga berkaitan erat dengan sifat unik realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia sebagai makhluk biologis, psikis, sosial dan budaya yang mengkaitkan makna *simbol verbal* dan *non verbal*

⁶⁰M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 101.

⁶¹C. Robert Bogdan dan S.J. Taylor, *Introduction of Qualitative Research Methods: a Phenomenological Approach to the Social Sciences* (New York: John Wiley & Sons, 1973), hlm. 115.

⁶²Yudistira K. Garna, *Tradisi Transformasi Modernisasi dan Tantangan Masa Depan di Nusantara* (Bandung: UNPAD, 1999), hlm. 33.

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 1994), hlm. 4.

⁶⁴S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 1, 17.

yang digunakan dalam mengorganisasikan sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Atas dasar itu yang digunakan adalah kualitatif.⁶⁵ Bognan dan Biklen⁶⁶ mengemukakan, metode kualitatif termasuk jenis penelitian yang memiliki ciri tertentu menurut pendekatannya, dijelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena sosial dari pandangan pelakunya. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara berpartisipasi, wawancara secara mendalam dan metode lain yang menghasilkan data deskriptif guna menyingkap sebab dan proses terjadinya peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian, kemudian analisis datanya bersifat deskriptif. Penelitian ini berusaha memahami secara personal dorongan dan keyakinan yang mendasari tindakan manusia yang bermakna.

Pendapat ini senada dengan Koentjaraningrat,⁶⁷ bahwa data kualitatif merupakan wujud kata-kata dari pada deretan angka-angka yang senantiasa menjadi bahan utama ilmu-ilmu sosial tertentu, terutama antropologi, sosiologi dan sejarah. Penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya. Metode ini cocok untuk melihat secara kontekstual dalam kehidupan sosial.

Dasar pertimbangan digunakan metode kualitatif ialah: (a) data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkup setempat, (b) dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologi, menilai sebab akibat dan

⁶⁵Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 3.

⁶⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Rosda Karya, 2001), hlm. 122.

⁶⁷Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 254.

memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat, (c) dapat membimbing untuk memperoleh penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru, dan (d) dapat melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal, temuan penelitian kualitatif mempunyai mutu yang tidak dapat disangkal, mempunyai kesan yang nyata, hidup dan bermakna.

Keuntungan dari metode ini adalah peneliti sebagai pengamat langsung berada di wilayah atau dalam kelompok masyarakat yang diteliti. Berkaitan dengan kegiatan ini, kedudukan peneliti dapat berstatus: (a) peserta penuh (*Complete Participant*), (b) peserta sebagai pengamat (*Participant as Observer*), (c) pengamat sebagai peserta (*Observer as Participant*), dan (4) pengamat penuh (*Complete Observer*).

Berdasarkan pertimbangan ini, beberapa karakteristik dalam penelitian adalah sebagai berikut: (a) Peneliti sebagai instrumen penelitian. Peneliti adalah alat peneliti utama yang melakukan sendiri pengamatan dan wawancara dengan informan, (b) Mencari makna di belakang kelakuan atau perbuatan. Upaya ini berusaha memahami simbol-simbol yang terdapat dalam kelakuan orang, dan atau kelompok dalam masyarakat, (c) Menonjolkan rincian kontekstual. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data secara rinci mengenai hal-hal yang bertalian dengan masalah yang diteliti, (d) Informasi dan sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan data, (e) Menggunakan perspektif etnik. Artinya membandingkan pandangan informan, bagaimana ia memandang dan menafsirkan dari segi pendiriannya, (f) Verifikasi, antara lain melalui kasus yang bertentangan untuk memperoleh hasil yang dapat

dipercaya, dan (g) Mengadakan analisis sejak awal penelitian dan selanjutnya sepanjang melakukan penelitian.

Analisis dengan sendirinya timbul ketika menafsirkan data yang diperolehnya. Berdasarkan proses tersebut dalam penelitian ditentukan tiga tahap, yaitu melakukan: (a) pengumpulan informasi mengenai nama-nama kiai dan tokoh (intelektual, jawara, ajengan, pemuka masyarakat, birokrat) lain dari berbagai peristiwa mobilisasi kepemimpinannya; informasi ini dikumpulkan dari informan kunci sebagai narasumber, aparat pemerintah desa, kecamatan, majelis ulama, dan tokoh masyarakat, (b) *listing* terhadap kiai dan tokoh masyarakat lainnya, dan (c) pengumpulan informasi secara sengaja (*purposif*) berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahap demi tahap.

3. Tahap Penelitian di Lapangan

Secara garis besar penelitian di lapangan dilakukan dalam tiga tahap, ini mengacu pada pendapat Moleong,⁶⁸ yaitu:

- a) Tahap *Orientasi*. Pada tahap ini mengumpulkan data secara umum melalui wawancara terbuka dengan informan untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan yang dipimpin kiai, serta sistem pengetahuan yang dimilikinya. Informasi ini selanjutnya dijadikan sebagai fokus penelitian.
- b) Tahap *Eksplorasi*. Pada tahap ini peneliti mencari dan menggali data masalah penelitian di lapangan. Pada tahap ini fokus penelitian lebih terarah sehingga dapat dikumpulkan data yang dijadikan fokus penelitian, yaitu tentang pemanfaatan do'a agama dalam kepemimpinannya. Wawancara lebih berstruktur

⁶⁸Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 94-102.

dan mendalam (*depth interview*) dilakukan untuk memperoleh informasi data penelitian. Untuk kepentingan ini, dipilih informan yang kompeten dan memiliki pengetahuan cukup banyak tentang hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Informan kunci seperti. K.H. Masdar Hilmi, Ketua Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah NU; K.H. Sonhaji, Pimpinan Pontren Sukamiskin dan Pengurus NU Bandung; K.H. Totoh Abdul Fatah, Pimpinan Pesantren Al-Jawami Bandung, K.H. Ceng Aam Ridwan, Pimpinan Pontren Al-Huda Garut, K.H; Abdullah Bakri, Pimpinan Pontren Al-Ulum Garut; K.H. Yusuf, pengurus NU Garut; K.H. E. Fachruddin Masthuro, Pimpinan Perguruan Islam Al-Masthuriyah Sukabumi; dan K.H. Hamdun Ahmad, Ketua STAI Al-Masthuriyah Sukabumi.

- c) Tahap *Member Check* (Pengecekan Anggota). Pada tahap ini peneliti meminta pendapat informan untuk menilai kebenaran data tentang substansi permasalahan. Pada tahap ini hasil wawancara dan pengamatan yang terkumpul, yang sejak semula dianalisis, dituangkan dalam tulisan catatan lapangan yang hasilnya diperlihatkan kepada informan untuk diperiksa kebenarannya, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. *Member Check* dilakukan setiap selesai wawancara, hasilnya dirangkum dari hasil pembicaraan dengan informan untuk mengadakan perbaikan lebih lanjut, kemudian dikonfirmasi kembali.

4. Pemilihan Informan

Pemilihan informan dilakukan melalui *Sampling Bertujuan* dan *Snowball Sampling*. Dengan demikian, informan dalam penelitian ini terdiri dari pemimpin tradisional kiai dan pemimpin formal, termasuk di dalamnya *kuncen* dan anggota masyarakat yang dipimpinnya. Pertama pemimpin tradisional diminta menunjukkan

orang lain yang dapat memberikan informasi, begitu pula anggota masyarakat dan keduanya diminta pula agar menunjukkan orang lain lagi, dan seterusnya hingga dicapai tahap *redundancy* (dianggap cukup informasi yang diperlukan). Hal ini dilakukan dengan menunjuk *key information*, di antaranya pengurus NU dan pimpinan pondok pesantren yang ada di Jawa Barat sejumlah 10 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pertimbangan, yaitu bahwa: (a) peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan, (b) peneliti sebagai alat berupa menyesuaikan perilaku terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan beragam data sekaligus, (c) tiap situasi merupakan keseluruhan dan peneliti sebagai alat berupaya memahami seluk-beluk situasi, dan (d) peneliti sebagai alat menafsirkannya, dan memunculkan kesimpulan sementara guna menentukan arah pengamatan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *observasi* dan wawancara mendalam (*depth interview*). *Observasi* dilakukan untuk mengumpulkan informasi berkenaan dengan perilaku mengkomunikasikan pesan interaksi dalam konteks *intrabudaya* di antara pemimpin tradisional dengan anggota masyarakat. Peneliti telah menggali makna budaya (*culture meaning*) dari setiap objek yang diteliti dengan mengkaitkan informasi dengan konteksnya.

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam lagi mengenai substansi bagi pemimpin tradisional dengan pemanfaatan agama yang dimiliki oleh informan dalam memandang *realitas sosial* dari segi *perspektifnya* (*informasi etnik*).

Informasi etnik ini diolah dan ditafsirkan oleh peneliti sehingga melahirkan *etik* (pandangan mengenai data). Wawancara tersebut dilakukan dalam bentuk percakapan informal mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan fenomena objek penelitian.⁶⁹

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan data dalam penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Mengacu pada pendapat Nasution,⁷⁰ bahwa terdapat empat kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kualitatif, yaitu:

- a) Derajat Kepercayaan (*Credibility*). Kredibilitas ini merupakan pengganti konsep validitas internal dalam penelitian kualitatif. Teknik-teknik untuk menentukan kredibilitas penelitian ini adalah: (1) memperpanjang masa observasi, (2) pengamatan yang terus-menerus, (3) triangulasi, (4) membicarakan dengan orang lain, (5) menganalisis kasus negatif, (6) menggunakan bahan referensi, dan (7) mengadakan *member check*.
- b) Keteralihan (*Transferability*). Konsep ini merupakan pengganti konsep validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Transferabilitas diperlukan dalam penelitian kualitas untuk menunjukkan kemungkinan hingga hasil penelitian dapat dipakai untuk digunakan dalam situasi-situasi lain.
- c) Ketergantungan (*Dependability*). Dependabilitas ini merupakan konsep *reabilitas* dalam penelitian kualitatif sebagai syarat bagi *validitas*, hanya dengan alat yang *reliabel* dapat diperoleh data yang *valid*. Mengingat dalam penelitian kualitatif

⁶⁹Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, hlm. 137-145.

⁷⁰S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, hlm. 105-124.

alat utamanya adalah peneliti itu sendiri, maka dependabilitas ini dapat dicapai dengan cara *audit trait* (jejak yang dapat dilacak) sebagai upaya penyatuan dependabilitas dengan *konfirmabilitas*.

- d) **Kepenguatan (*Confirmability*)**. *Confirmability* ini merupakan pengganti dari konsep *objektivitas* dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, *objektivitas* itu diukur melalui kesesuaian *inter subjektif* dalam membenaran dan *konfirmasi*, serta melalui peneliti itu sendiri.

7. Analisis Data

Analisis data⁷¹ sebagai proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan yang berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Tafsiran memberikan makna kepada analisis, menjalankan pola atau konsep secara *induktif*. Analisis data ini dilakukan dalam tiga cara, yaitu :

- a) ***Reduksi Data***. Data tentang kepemimpinan tradisional yang memanfaatkan agama dan magis yang diperoleh di lapangan diketik ulang dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut *direduksi*, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang *direduksi* memberi gambaran yang lebih mendalam tentang hasil pengamatan dan wawancara. *Reduksi* data dapat membantu untuk memberikan kode kepada aspek yang dibutuhkan.
- b) ***Display Data***. Yaitu kepemimpinan tradisional dengan pemanfaatan agama dan magis oleh pemimpin tradisional kepada anggota masyarakat dalam paparan disertai analisis. Hal ini dilakukan, mengingat data yang terkumpul banyak

⁷¹Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, hlm. 39.

hingga kesulitan dalam menggambarkan dan mengambil kesimpulan. Kesukaran ini diatasi dengan cara membuat model atau tabel, sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rincian dapat dipetakan dengan jelas.

- c) Kesimpulan dan *Verifikasi*. Data yang sudah diperagakan, difokuskan dan disusun secara sistematis melalui penentuan tema, model atau tabel kemudian disimpulkan melalui *logika induktif* sehingga makna data bisa ditemukan.

8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jawa Barat (khususnya di Kabupaten Garut dan Bandung), dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a) Masih berlangsungnya kehidupan yang dikontrol oleh nilai dan norma tradisionalisme dan partikularisme yang bersumber dari pandangan yang mereka miliki dan tetap dipertahankan untuk tidak berubah dalam perubahan melalui interaksi intrabudaya;
- b) Pola, gaya, dan jaringan kepemimpinan tradisional masih tetap berlangsung;
- c) Adanya berbagai pengaruh *modernisasi* dan *diffusi inovasi* belum berhasil merubah aspek-aspek tradisionalisme;
- d) Penelitian yang sudah dilakukan belum menyentuh penemuan substansi pandangan masyarakat dengan pemanfaatan ritus do'a dalam agama bagi kepemimpinannya kepada anggota masyarakat dalam interaksi intrabudaya;
- e) Ada *stereotif* bagi masyarakat Jawa Barat dari orang luar bahwa daerah ini ialah daerah Nahdliyin dan sekaligus kiai tradisional. Seorang kiai dari daerah ini biasa disebut mempunyai sifat-sifat ke-Nahdiyyinan karena sikap keterusterangan dan keberaniannya. Demikian pula kiai disebut mempunyai sifat NU jika sedang dan

bisa bersikap lembut. Kiai bisa nampak ke-Nahdiyyinannya dan bisa lunak jika muncul ke-kiaiannya. Demikian dua tipe yang kadang-kadang dimiliki oleh seorang kiai atau seorang tokoh, sehingga orang luar menyebutnya daerah ini dengan daerah keras dan kasar; serta

- f) Pelaksanaan penelitian di Jawa Barat berlokasi di Bandung dan Garut sangat memungkinkan. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu hampir satu tahun dengan menggunakan waktu yang memungkinkan pencarian data di lapangan bisa dikejar dan dikerjakan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan laporan disertasi ini, sistimatikanya dipilih menjadi enam bab.

Bab *pertama*, pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian sosiologi-antropologi, dan strategi penelitian yang baku sesuai pedoman. Kemudian dilanjutkan dengan bab *kedua*, membahas dinamika tradisi kaum Nahdliyin tentang asal usul dan tradisi masyarakat Jawa Barat, terdiri dari awal pertumbuhan Islam di Jawa Barat, awal perkembangan Islam di Jawa Barat, corak budaya dan peradaban Islam Jawa Barat, corak pandangan kesundaan di Jawa Barat, gerakan sosial Islam awal di Jawa Barat, profil Anwar Mussadad tokoh NU Jawa Barat, lalu transformasi politik aliran kaum Nahdliyin, corak perubahan pemikiran politik aliran, corak pemikiran Islam kaum Nahdliyin, corak kekerabatan politik Nahdliyin, stratifikasi sosial masyarakat Jawa Barat, dan simbol-simbol keagamaan kaum Nahdliyin.

Bab *ketiga*, yaitu menelusuri akar budaya kaum Nahdliyin, yang membahas sekilas terbentuknya NU, paham aqidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, paham madzhab fikih/*Legal Maxime*, paham Sunni dalam dinamika politik NU terdiri dari internalisasi ideologi paham Sunni, sosialisasi Aswaja di kalangan Nahdliyin, aktualisasi politik NU pasca *khittah*, lalu basis penyebaran paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, fenomena sosio-kultural kaum Nahdliyin, hubungan kekerabatan dalam NU, dan tradisi kaum Nahdliyin.

Bab *keempat*, yaitu *istighatsah* dalam perkembangan masyarakat yang membahas konsep dan teori *istighatsah*, akar mistifikasi ritual *istighatsah*, ritual *istighatsah* dalam pengukuhan kekuasaan, ritual *istighatsah* dalam menggalang kekuatan, ritual *istighatsah* dalam membangun solidaritas sosial.

Bab *kelima*, analisis sosial kontekstual *istighatsah*, membahas *istighatsah* sebagai amalan kaum Nahdhiyin, *istighatsah* dalam bentuk *hadiwan*, *istighatsah* menuai *barakah* para wali, hakekat *istighatsah* bagi masyarakat Jawa Barat, meretas akar persoalan sosio-kultural, model perekatan solidaritas dalam pluralitas sosial, ekspresi keberagaman menuju kebersamaan, konkretisasi acuan dan kaidah *istighatsah*, *tahlilan*, marhabaan, ziarah kubur, syukuran, *istighatsah* dalam tradisi Nahdliyin, makna ritus *wirid* dalam tradisi Nahdliyin, makna *istighfar*, makna shalawat, makna dzikir.

Bab *keenam* merupakan benang merah dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang merupakan rangkaian yang tak terputus dari awal rumusan masalah sampai pemecahannya, yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil temuan yang diperoleh dari lapangan.

Terakhir merupakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan menunjang pada kesempurnaan laporan penyusunan disertasi. Riwayat hidup penulis disertakan pula untuk mengenalkan diri saja.



BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upacara *istighatsah* dalam konsep sosiologis-antropologis merupakan ritual dan proses legitimasi massa yang memakai simbol keagamaan sebagai sarana meraih kekuasaan politik, sosial, dan ekonomi pada tatanan masyarakat muslim dengan aneka formulasi yang efektif, khususnya masyarakat Nahdliyin Jawa Barat yang berhaluan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Upacara *istighatsah* dipandang oleh masyarakat Nahdliyin Jawa Barat sebagai ritual dan telah berkembang melalui transformasi budaya lokal dalam wujud internalisasi, sosialisasi, dan aktualisasi organisasi NU sebagaimana yang diteoritisasikan oleh pandangan sosiologis-antropologis. Bagi masyarakat Nahdhiyin Jawa Barat, ritual *istighatsah* memiliki makna substantif yang keberadaannya telah diterima, diakui, dihargai dan diamankan secara kultural. Upacara *istighatsah* dalam masyarakat Nahdliyin sebagai pernyataan simbolis yang teratur, suatu suasana pencitraan ikatan keagamaan yang bersifat massal. Makna *istighatsah* ini memuat inti tentang keyakinan, ritus dan upacara, sikap dan pola tingkah laku, serta alam pikiran dan perasaan masyarakat Nahdliyin.
2. Esensi ritual *istighatsah*, atau ritual *mujahadah, hadiwan, deba'an, tahlilan, syukuran, marhaba'an, manaqiban, qadiran, babarit, ruwatan, dan ziarah kubur (nyekar)* dengan memanjatkan *do'a, wirid, istighfar, shalawat*, bagi masyarakat

Nahdliyin, tampak menjadi kebiasaan pengamalan beragama, kendati belum menyentuh hakekat tata kelakuan dan adat istiadat yang memiliki efek sosial besar, namun dipandang sesuai dengan tuntunan ajaran dan tradisi NU. Sedangkan bagi penguasa, praktik ritual ini sebagai penentu dalam menjalin relasi dengan mengambil simbol agama yang fungsional bagi upaya legitimasi dan akumulasi kekuasaan. Upacara *istighatsah* bagi penguasa tidak hanya sebagai sumber pencerahan spiritual, pemberdayaan, dan pembebasan, namun diyakini memiliki pengaruh efektif bagi legitimasi atas kekuasaannya. Karenanya ritual *istighatsah* telah memperlihatkan fungsi sosial politik yang menentukan, yakni dalam hal mengatur, mempertahankan, dan memindahkan ikatan-ikatan keagamaan yang menjadi landasan kelangsungan dan ketergantungan berdasarkan hubungan relasional dengan masyarakat Nahdliyin, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Tindakan ritual *istighatsah* berfungsi bagi pelakunya mencapai suasana religius tertentu dengan *khusyuk* yang amat individual sifatnya; tidak ada dua orang akan mengalaminya dengan tingkat yang sama pada suasana upacara yang mereka ikuti, karena *kekhusyuannya* dilandasi oleh emosi keagamaan. Kesyahduan suatu upacara *istighatsah* amat ditentukan oleh *kekhusyukan* pelakunya di samping situasi, tempat upacara, lambang-lambang yang digunakan serta wujud do'a (*performance*) dari pemimpin upacara *istighatsah*. Implikasi *istighatsah* terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya tampak memiliki hubungan signifikan antara dimensi ritual dengan dampak sosial, politik, dan budaya. Dalam dimensi ritual, institusi *istighatsah* berfungsi sebagai media komunikasi antara hamba dengan

Tuhan, sedangkan dalam dimensi sosial politik institusi *istighatsah* berfungsi sebagai media untuk menumbuhkan solidaritas sosial politik di kalangan anggota masyarakat. Dengan demikian, relevansi *istighatsah* dalam sistem sosial budaya masyarakat Nahdliyin yang teramati tampak menjadi media untuk memperkuat hubungan solidaritas sosial (*Ukhuwah Islamiyah*) di antara anggota masyarakat, di samping menunjukkan penguatan ritual Islami pada setiap individu dalam menemukan jati diri di hadapan Tuhannya, sedangkan dalam dimensi sosial dapat dijadikan pembimbing tercapainya suatu cita-cita kolektif baik sosial maupun politik.

B. Rekomendasi

Rekomendasi ini dirumuskan berdasarkan hasil pengamatan dari keberlangsungan upacara *istighatsah* di lingkungan masyarakat Nahdliyin Jawa Barat sebagai berikut:

1. Konsep institusi sosial berupa kegiatan ritual *istighatsah* dalam konteks penerapan bagi penguatan mutu kehidupan, baik individu maupun sosial, perlu dikelola secara profesional dan kontekstual, agar memiliki arti dan makna yang mendalam sekaligus merupakan aset budaya bangsa secara mondial dan global. Peningkatan mutu pelayanan sosial kemasyarakatan melalui organisasi NU di Jawa Barat ini tampaknya bisa lebih efektif melalui aktivitas yang menimbulkan efek kesejahteraan, baik individual, sosial, maupun politik, berdasarkan prinsip Islam dan kearifan budaya lokal.
2. Selayaknya institusi *istighatsah* itu dapat berfungsi tidak hanya ditinjau dari kerangka syari'at, tetapi juga sudah saatnya dilihat dari aspek sosial budaya.

Institusi *istighatsah* ini merupakan penyelaras kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang bagi masyarakat Nahdliyin Jawa Barat dalam mewujudkan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.

3. Tradisi ritus yang diamalkan masyarakat Nahdliyin dapat berdampak dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan derajat kemanusiaan, karena makna dan fungsi ritus tersebut menjadi titik temu dari nilai, moral, dan etik agama yang lintas wahyu, lintas waktu, dan lintas tempat. Hal ini sejalan dengan dinamika tuntutan global, bahwa harus ada konsensus nilai, moral, dan etik di antara agama-agama di dunia dalam membangun moral dan global. Tentunya diharapkan kepada setiap agama, terutama para penganutnya agar mengendalikan konflik, menanggalkan arogansi, sikap saling curiga, prasangka buruk dan sikap saling melecehkan. Sehingga terbangun suatu kesejatian persaudaraan dan kerjasama antar agama dalam menggali kekayaan moral dan etik yang menjadi milik bersama. Selain itu, tradisi *istighatsah* kaum Nahdliyin tampak semakin mendukung pemeliharaan dan penyempurnaan nilai estetik, nilai etika, dan nilai religiositas dalam pembangunan kebudayaan dan peradaban baru.



DAFTAR PUSTAKA

- A.G., Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon*, Jakarta: Logos, 2001.
- Abbad, Ibnu, *Surat-surat Sang Sufi*, Bandung: Mizan, 1993.
- Abbas, Sirajuddin, *40 Masalah Agama*, Jakarta: t.p., 1985.
- Abdullah, Irwan, "Dari *Bounded System* ke *Borderless Society*: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini" dalam *Antropologi Indonesia*, Th. XXIII, No. 60, Sep-Des, 1999.
- , "Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan" dalam Hans Daeng, *Manusia dan Kebudayaan Tinjauan Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Abdullah, K.H. Ridlwan (1884-1962), "Pencipta Lambang NU, dalam Khairul Anaman (ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya: Al-Falah, 1984.
- Abdullah, M. Amin, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2000.
- , *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- , *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Abdullah, Taufik (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- , *Kepemimpinan Umat Islam di Indonesia*, Jakarta: Mimbar Ulama MUI, 2001.
- Abegebriel, A. Maftuh dan A. Yani Abeveiro, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*, Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Adimihardja, Kusnaka, *Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan Jawa Barat*, Jakarta: Proyek IDKD Depdikbud, 1986.
- Akiner, S., "Islam di Uni Soviet" dalam *Panji Masyarakat*, No. 350, 11 Februari 1982.
- Alatas, Syed Muhammad Naquib, *Islam and Secularism* (Islam dan Sekularisme), terj. Karsidjo Djojosuwarno, Bandung: Pustaka Salman, 1981.
- Alfian, *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, Jakarta: Pustaka Grafika, 1990.
- Alford, R.R., "Religion and Politics" dalam Roland Robertson (ed.), *Sociology of Religion*, Baltimore: Pengusi Book Inc, 1972.

- Ali, Fachry dan Bachtiar Effendi, "Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan" dalam Farchan Bulkin (ed.), *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Ali, Fachry, *Islam, Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural*, Bandung: Mizan, 1984.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2003.
- Amaladoss, Michael, *Teologi Pembebasan Asia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ambari, Hasan Muarif, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Jakarta: Logos, 1998.
- Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Sala: Jatayu, 1985.
- Anonymous, *Nahdlatul Ulama 1984-1989*, Kumpulan Berita dan Tulisan tentang NU, Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr (LTN) bekerjasama dengan Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM), 1989.
- Anwar, Ali, *Dinamika Pemikiran Elite Politik Nahdlatul Ulama (NU): Menelusuri Gagasan Para Elite Partai Politik di Lingkungan NU*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Asy'ari, Hasyim, *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama*, Kudus: Menara, 1969.
- Atja, *Carita Purwaka Caruban Nagari: Karya Sastra sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*, Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1986.
- Azhari, Muntaha dan Abdul Mun'im Saleh (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M, 1989.
- Azizy, Ahmad Qodri A., *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama: Jaringan Ulama Abad 17-19*, Bandung: Mizan, 1994.
- Baal, J. van, *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya (Hingga Dekade 1970) Jilid II*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Balandier, Georges, *Antropologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Barjanzi, al-, *Majmu'ah al-Mawalid*, Bandung: Maktab Dahlan, t.t.
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Becker, Howard, *Outsider: Studies in the Sociology of Deviance*, New York: Free Press, 1983.
- Bellah, R.N., *Beyond Belief: Menemukan Kembali Agama*, terj. Ihsan Ali Fauzi, Jakarta: Paramadina, 2000.

- Berger, P.L., *Kabar dari Langit: Makna Teologi dalam Masyarakat Modern*, terj. Hartono, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Bertrand, R., *New Hopes for a Changing World*, London: G.Allen & Unwin, 1951.
- Binder, Leonard, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*, Chicago: The University of Chicago Press, 1988.
- Bleeker, C.J., *Pertemuan Agama-agama Dunia*, Bandung: Sumur Bandung, 1964.
- Bogdan, C. Robert dan S.J. Taylor, *Introduction of Qualitative Research Methods: a Phenomenological Approach to the Social Sciences*, New York: John Wiley & Sons, 1973.
- Boland, B.J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, Leiden: The Haque, 1971.
- Brickman & Lehrer, *Automation, Education and Human Values*, New York: Thomas Crowell Company, 1969.
- Bronowski & Bruce Mazlish, *The Western Intellectual Tradition*, New York: Harper and Row, 1962.
- Bruinessen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Budhisanthoso, *Karakteristik Suku-suku di Indonesia dalam Kaitan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Depdikbud, 1984.
- Budiardjo, Miriam, "Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan" dalam Miriam Budiardjo (ed.), *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Burchardt, Titus, *Mengenal Ajaran Kaum Sufi*, terj. Azyumardi Azra, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Carol, Stephen J., & Henry L. Tori, *Organizational Behavior*, New York: John Wiley, 1997.
- Cassirer, Ernest, *Manusia dan Kebudayaan*, terj. Alois A. Nugroho, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Cohen, P.S., *Modern Social Theory*, London: Heinemann, 1992.
- Connoly, Peter (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Daman, Rozikin, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Hittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- David, *Antireligious Propaganda in The Soviet Union*, Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology, 1978.
- Desouki, Ali, "Sekularisasi, ke Arah Studi Perbandingan tentang Pengalaman Dunia Nasrani dan Alam Islami" dalam *Dialog*, terj. Djohan Effendi, Volume 3, September 1977.

- Dhavamony, Mariasusai, *Fenomenologi Agama*, terj. A. Sudiarja et.al, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Digan, Parig, "Indonesia: Betwen Religous vs Secular" dalam *Pro Mundi Vita Bulletin*, No. 64, Januari/Februari, 1977.
- Dijk, Cornelis Van, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, terj. Tim Grafiti Press, Jakarta: Grafiti Press, 1983.
- Djajadiningrat, Hoesein, *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten*, Jakarta: Djambatan, 1983.
- Djam'annuri, *Studi Agama-agama: Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2003.
- Djamari, *Agama dalam Perspektif Sosiologi*, Bandung: Alfabeta, 1988.
- Djazuli, A., "Dinamika Fiqh Kontekstual dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Makalah Orasi Ilmiah*, IAIN SGD Bandung, 1989.
- Drewes, G.W.J., "Indonesia: Misticisme dan Aktivisme", dalam Gustave E von Grunebaum (ed), *Islam Kesatuan dalam Keragaman*, terj. Effendi N. Yahya Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1975.
- Durkheim, Emile, *Sejarah Agama*, terj. Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara, Menafsirkan Islam Politik di Indonesia: Tinjauan Teoretis*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Effendi, Johan, "Dialog Antar Agama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan" dalam *Prisma*, No. 5, Juni 1978.
- Ekajati, Edi S., *Islamisasi di Daerah Jawa Barat*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1988.
- , *Kebudayaan Sunda, Suatu Pendekatan Sejarah*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Ellen, Malinowski *Between Two World, The Polis Roots of on Anthropological Tradition*, Sydney: Cambridge University Press, 1988.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Sunda*, Bandung: Pustaka Jaya, 2000.
- Esposito, John L., 1992, *Islamic Treath, Myth or Reality*, New York: Oxford University Press, 1992.
- Everett, M. Rogers, *Diffusion of Innovation*, New York: The Free Press, 1983.
- Fathoni dan Zen, *NU Pasca Hittah Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Mediawidia Mandala, 1992.
- Fattah, Munawar Abdul, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

- Fealy, Greg, dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, terj. Ahmad Suaedy et.al, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- , *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*, terj. Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtiar, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Feillard, Andree, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Bentuk, Isi, Makna*, terj. Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Feillard, Andree, *Gusdur NU, dan Masyarakat Sipil*, terj. Amirudin Arrany, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Fromm, Eric, *Memiliki dan Menjadi; Tentang Dua Modus Eksistensi*, terj. F. Soesilo Hardo, Jakarta: LP3ES, 1987.
- , *The Revolution of Hope*, New York: Bantam Books, 1968.
- , *To Have or To Be*, New York: Bantam, 1981.
- Galtung, Johan, *The True Worlds: A Transnational Perspective*, New York: Free Press, 1980.
- Garaudy, Roger, *al-Ushululiyat al-Mu'ashirah, Ashbabuha wa Madzahibuha*, terj. Afif Muhammad, Paris: Dar Am Alfain, 1992.
- Garna, Yudistira K., *Tradisi Transformasi Modernisasi dan Tantangan Masa Depan di Nusantara*, Bandung: UNPAD, 1999.
- Geertz, Clifford, *Islam Observed: Religious Development in Morocco in Indonesia*, Chicago & London: University of Chicago Press, 1971.
- , *The Interpretation of Culture*, New York: Basic Books, 1973.
- , *The Religion of Java*, New York: The Free Press of Glencoe, 1960.
- Goddy, J., *Religion and Ritual: The Definitional Problem*, Britania: J. Sociology, 1961.
- Goodman, Douglas J., *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Grunebaum, Gustav E. von, *Unity and Variety Muslim Civilization*, Chicago University of Chicago Press, 1953.
- Haddad, Abdullah, *Thariqah Menuju Kebahagiaan*, Bandung: Mizan, 1994.
- Haikal, M. Husain, *Sejarah Hidup Muhammad Saw.*, terj. Ali Audah, Jakarta: Yudistira, 1989.
- Hamim, Thaha, *Paham Keagamaan Kaum Reformis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Hamka, *Agama dan Negara Menurut Islam*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1970.
- , *Tafsir al-Azhar*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Hasil Musyawarah Kubro Nasional, *Munas Thoriqoh*, Bandung: an-Nahdliyyah, 2002.

- Tihami, *Ulama dan Jawara*, Hasil Penelitian Fakultas Syari'ah Serang, 1982.
- Hasyim, Umar, *Toleransi Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Haviland, William A., *Antropologi*, terj. R.G. Soekadijo, Edisi keempat, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Hefner, Robert W., *Civil Islam*, terj. Ahmad Baso, Yogyakarta: ISAI-LKiS, 2001.
- Hendropuspito, D., *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Hielmy, Irfan, *Pesan Moral dari Pesantren, Meningkatkan Kualitas Umat Menjaga Ukhuwah*, Bandung: Nuansa, t.t.
- Horikoshi, Hiroko, *Kiai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1987.
- Huntington, P. Samuel dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Ali Noer Zaman, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ibrahim, Rustam (ed.), *Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000*, Jakarta: Casda, LP3ES, 1995.
- Ibrahim, Saad Edin, "Islamic Militancy as Social Movement: The Case of Two Groups in Egypt" dalam Ali E. Hilal Dasouki (ed), *Islamic Resurgence in the Arab World*, New York: Praegerm, 1982.
- Ibrahim, Umar, *Thariqah 'Alawiyyah*, terj. Tholib Anis, Bandung, Mizan, 2001.
- Ida, Laode, *Anatomi Konflik, NU, Elit Islam dan Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Ilham, Arifin, *Indonesia Berdzikir*, Jakarta: Intuisi Press, 2004.
- Imron Hamzah dan Chaerul Anam (Peny.), *Gus Dur Diadili Kiai-kiai*, Surabaya: Bima Satu, 1999.
- Iqbal, Muhammad, *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*, Jakarta: Tintamas, 1966.
- Irsyam, Makhrus, *Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984.
- Iskandar, M., *Para Pengemban Amanah Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat 1900-1950*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2001.
- Ismail, Faisal, *NU: Gusdurisme dan Politik Kiai*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- , *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Iver, Mac and Page, *The Modern State*, London: Oxford University, 1974.
- J., Gillin L., & Gillin J.P., *Cultural Sociology*, New York: The Mac Millan Company, 1974.

- Jackson, Karl D., *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat*, terj. Tim Pustaka Utama, Bandung: Pustaka Utama Grafiti, 1990.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Gus Dur Menjual Bapak-nya*, Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Jansen, G.H., *Islam Militan*, Bandung: Pustaka Salman, 1980.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori-teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M. Z. Lawang Jakarta: Gramedia, 1996.
- K.M., Saini, *Krisis Kebudayaan*, Bandung: Kelir, 2004.
- Kahin, George MacTurnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca & London: Cornell University Press, 1970.
- Kahmad, Dadang & Afif Muhammad, "Menggagas Strategi Kebudayaan Islam" dalam *Pikiran Rakyat*, tanggal 5-6 Januari 1996.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Kartodirdjo, Sartono, "Kebangkitan dan Peranan Pemimpin-pemimpin Kharismatik", tulisan Ann Ruth Willner dan Dorothy Willner, dalam *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- , *Sejarah dalam Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Keesing, Roger M., *Antropologi Budaya: Sebuah Perspektif Kontemporer*, terj. Samuel Gunawan, Jilid 1 dan 2, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Keller, Suzanne, *Penguasa dan Kelompok Elite*, terj. Selo Soemartjan dan Miriam Budiardjo, Jakarta: YIIS, 1995.
- Keputusan Munas Alim Ulama & Kombes Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung, *Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr*, Jakarta: PBNU, 1992.
- Kharisuddin, "Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah (Studi Tentang Ajaran dan Teori-teori Filsafatnya)", *Tesis* pada Program Magister Pascasarjana, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997, tidak dipublikasikan.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1981.
- , *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1983.
- , *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Krech, David *et al.*, dalam *Individual in Society*, Tokyo: McGraw-Hill, 1962.
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.
- , *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung: Mizan, 2001.
- , *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Legge, J.D., *Indonesia*, Sidney: Prentice-Hall Australia, 1980.

- Ling, Martin, *Membedah Tasawuf*, terj. Abdul Hadi W.M., Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Littlejohn, Stephen W., *Theoris of Human Communcation*, California: Wadsworth Publishing Company, 1996.
- Lubis, Nina H., *Banten dalam Pergumulan Sejarah, Sultan, Ulama, Jawara*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Madjid, Nurcholish, "Masalah Tradisi dan Inovasi Keislaman dalam Bidang Pemikiran serta Tantangan dan Harapannya di Indonesia" dalam Ahmad Zacky Siradj (et.al.), *Islam dan Kebudayaan Indonesia, Dulu, Kini, dan Esok*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993.
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paradigma, 1997.
- , *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- , *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Madjid, Nurcholish, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- , *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mahfudh, K.H.M.A. Sahal, *Pesantren Menari Makna*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Majalah *Tempo*, 3 Mei 1980.
- Maliki, Zainuddin, *Agama Priyayi, Makna Agama di Tangan Elite Penguasa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Martin, Richard C., *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, Malang: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Marx, Karl & Frederick Engels, *On Religion*, Moskow: Foreign Language Publishing House, 2nd edition., 1955.
- Marzuki Wahid, *Dinamika NU, Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999)*, Jakarta: Kompas dan Lakspedam NU, 1999.
- Mas'ud, Abdurahman, "The Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teaching, (1950-1950)" *Disertasi* pada Program Doktor Pascasarjana, Los Angeles: University of California, 1997, tidak diterbitkan.
- Mas'udi, Masdar F., *Politik NU: Mengusung Keadilan Berdemokrasi*, Jakarta: P3M, 1999.
- Mastuki, *Kiai Menggugat, Mengadili Pemikiran Kang Said*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Maududi, Abul A'la al-, *Al-Islam wa Ittahiyyat al-Mu'ashirah*, Beirut: Dar Al-Qalam, 1976.

- Meuleman, Johan, "Analisis Buku-buku tentang Wanita Islam yang Beredar di Indonesia dalam Lies. M. Marcoes-Natsir & Johan Hendrik Meuleman (ed), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mills, C. Wright, *The Power Elite*, Oxford New York: University Press, 1959.
- Miriam, Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Obor, 1998.
- Moens, *Budhisme di Jawa dan Sumatera dalam Masa Kejayaannya Terakhir*, Jakarta: Brathara, 1974.
- Moesa, Ali Maschan, *Kiai & Politik dalam Wacana Civil Society*, Surabaya: LEPKISS, 1999.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Morris, Brian, *Antropologi Agama*, Yogyakarta: AK Group, 2005.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Jakarta Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad, Afif, *Dari Teologi ke Ideologi: Studi tentang Corak Pemikiran Sayyid Quthb*, Bandung: Pena Merah, 2005.
- , *Islam Non-Sektarian: "Madzhab" Masa Depan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Muksin, Ucin, *Kawin Kontrak di Cisarua Bogor*, Bandung: Pusat Penelitian IAIN SGD, 2003.
- Mulder, Niel, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan*, terj. Sukadji Ranuwiharjo, Yogyakarta: Gajah Mada University Press & Sinar Harapan, 1981.
- , *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya Jawa, Muangthai dan Filipina*, terj. Satrio Widiatmoko, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Muljono, Slamet, *Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Majapahit*, Jakarta: Balai Pustaka, 1965.
- Mulkan, Abdul Munir, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, Yogyakarta: Bentang, 2000.
- Murdock, G.P., *Social Structure in South East Asia*, New York: Wenner Grenn Foundation for Antropological Research, 1960.
- Muzadi, A. Muchith, *NU dan Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM, 1994.
- Naisbitt, John, *Megatrends: Ten New Directions Taransforming Our Lives*, New York: Warner Books, 1984.
- Nashr, Sayyed Hossein, *Islam dalam Cita dan Fakta*, terj. Bosko Carvalo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.

- , *Nestapa Manusia Modern*, terj. Ahmad Rifa'i Hasan, Bandung: Pustaka Salman, 1985.
- , *Tasawuf Dulu dan Sekarang*, terj. Danarto, Bandung: Mizan, 1994.
- Nasuha, Chozin, "Hadiwan Do'a Lewat Guru Tarekat" dalam *Pesantren* No. 1/Vol IX/ 1992, Jakarta: LP3M, 1992.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Natsir, M., *Mencari Modus Vivendi Antar Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Media Da'wah, 1980.
- Natsir, Nanat Fatah, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*, Bandung: Gunung Djati Press, 1999.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- , *Masalah Ulama Intelektual atau Intelektual Ulama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- , *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti Pers, 1987.
- Nursi, Said, "Kekuatan Lain di Turki" dalam *Kompas* 14 Juli 1997.
- O'dea, Thomas F., *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Pals, Daniel L., *Seven Theories of Religion*, Yogyakarta: Kalam, 2001.
- Parsons, Talcott, *The Social System*, New York: Free Press, 1951.
- Passen, Y. Van, "Kerjasama Antar Agama dan Prospeknya: Kasus Sulawesi Utara" dalam *PRISMA*, No. 5, Juni 1978.
- Pour, Julius, "Abdurrahman Wahid Mungkin Memang Misteri" dalam *Kompas*, 25 Juli 2001.
- Praff, William, "Help Algeria's Fundamentalists" dalam *The New Yorker*, 28 Januari 1991.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Puar, Yusuf Abdullah, *Panca Agama di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978.
- Purwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Qadir, C.A., *Philosophy and Science in the Islamic World*, London: Croom Helm Limited, 1998.
- Qomar, Mujamil, *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Rahardjo, Dawam (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- , *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1999.

- , *Reformasi Politik: Dinamika Nasional dalam Arus Politik Global*, Jakarta: Intermasa, 1997.
- Rahman, Budi Munawar, *Islam Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Pustaka Salman, 1985.
- Rais, M. Amien, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Redfiled, Robert, *The Little Community and Peasant Society and Culture*, Chicago: Chicago University Press, 1961.
- Republika*, edisi 25 Nopember 1999.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi, 2005.
- Rifai, M., *Surat Yasin Tahlil dan Istighatsah*, Surabaya: Cipta Media, t.t.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Robertson, R., *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Rodinson, Marxime, "The Western Image and Western Studies of Islam" dalam Joseph Schacht dan C.E. Bosworth (ed.), *The Legacy of Islam*, New York: Oxford University Press, 1974.
- Rosyadi, Khoirul, *Mistik Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Jendela, 2004.
- Sachlins, Marshall, "Remarks on Social Structure in Southeast Asia" dalam *Journal of the Polynesian Society*, 1993.
- Saefuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, Jakarta: Gunung Agung, 1987.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Salamah, Ummu, *Tradisi dan Akhlak Pengamal Tarekat*, Garut: Yayasan Al-Musaddadiyah, 2001.
- Schimmel, Annemarie, *Dimensi Mistik dalam Islam*, terj. Sapardi Djoko Damono, Jakarta: Firdaus, 1986.
- Schroeder, Ralph, *Max Weber tentang Sistem Kepercayaan*, peny. Heru Nugroho, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Schumacher, E.F., *Keluar dari Kemelut*, terj. Mochtar Pabottinggi Jakarta: Gramedia, 1990.
- Scott, James C., *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Siddiq, Ahmad, *Amanat Rais Am PBNU pada Peringatan Hari Lahir NU ke-62*, Jakarta: PBNU, 1980.
- Siegfried, Andre, *Nations Have Souls*, New York: Putnam's Sons, 1952.
- Sihab, Alwi, *Membendung Arus Gerakan Muhammadiyah*, Bandung: Mizan, 1998.

- Siradj, Said Aqiel, "Tasawuf Sebagai Manifestasi Nilai Spiritualitas Islam dalam Sejarah" dalam *Makalah* pada Saresehan Nasional Tasawuf Indonesia, Jakarta, 2 Juni 1996.
- Sitompul, Martahan E., *NU dan Pancasila*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Smith, Donald Eugene, *Religion, Politics and Social Change in the World*, London: MacMilan Publishing Coy, 1971.
- Soeharto, "Pidato Kenegaraan Sidang Pleno DPR 16 Agustus 1982" dalam *Kompas*, 18 Agustus 1982.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, Jakarta: Panitia Penerbit, 1965.
- Soewardi, Herman, *Roda Berputar Dunia Bergulir, Kognisi Baru tentang Timbul Tenggelmnya Sivivilisasi*, Bandung: Bakti Mandiri, 2004.
- Steenbrink, Karel A., *Perkembangan Teologi dalam Dunia Kristen Modern*, terj. Alef Theria Wasim, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1987.
- Stoddard, L., *The New World of Islam*, terj. Mulyadi Djojomartono, Jakarta: Gunung Agung, 1966.
- Subagya, Rachmat, *Agama Asli Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Sukidi, "Mempertegas Kembali Ilmu Sosial Profetik" dalam *Republika*, 14 November 1997.
- Sumartana, Th., "Teologi Pembebasan, Kepalan Tangan Sang Uskup" dalam *Prisma, Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma Tahun 1975-1984*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1984.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Syakir, U. Balukia, *Ahlu Sunnah wa al-Jamaah*, Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Syamsuddin, M. Din (ed.) *Muhammadiyah Kini & Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Taher, Tarmidzi, "The Future Trend of the Muslim World Toward Harmony of The East and The West (An Islamic Perspective from Indonesia)", *Makalah*, Connecticut, USA, March 6, 1997.
- Tessier, V. Sukanda, "Naskah yang Belum Diinventarisasi di Jawa Barat" dalam *10 Tahun Kerjasama Puslit Arkenas dan EFEO*, Jakarta: Puslit-Arkenas-Depdikbud, 1987.
- Tibbi, Bassam, *Krisis Peradaban Islam Modern*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

- Tihami, "Kiyai dan Jawara di Banten (Studi tentang Agama, Magi, dan Kepemimpinan di Desa Pasanggrahan Serang Banten)" dalam *Tesis* pada Program Pascasarjana UI Jakarta, 1992. tidak dipublikasikan.
- Tillich, Paul, *Systematic Theology*, London: Nisbet and Company, 1955.
- Tofler, Alvin, *Future Shock*, New York: Bantam Book, 1970.
- Tolkhah, Imam, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia, Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Madukoro*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Trimo, *Analisa Kepemimpinan*, Bandung: Angkasa, 1984.
- Turmudi, Endang (ed.), *Nahdlatul Ulama: Ideologi Garis Politik dan Cita-cita*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- , *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Ufford, *Kepemimpinan Lokal*, Jakarta: Gramedia 1988.
- Uhlin, Anders, *Oposisi Berserak Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Undang, Gunawan, *Konflik dan Integrasi: Perubahan Gerakan Partai Politik Islam Pasca Orde Baru di Jawa Barat*, Disertasi, pada Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2006. tidak dipublikasikan.
- Valiudin, *Zikir dan Kontemplasi dalam Tasawuf*, Jakarta: Hidayah, 1996.
- Varma, S.P., *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Vernon, Glenn M., *Sociology of Religion*, New York: McGraw Hill Book Coy, 1962.
- Waardenburg, Jacques, "Islamic Studies", dalam Nur A. Fadhil Lubis (ed.), USA: *Introductory Readings on Islamic Studies*, 1998.
- Wahid, Abdurahman, *Menggerakkan Tradisi, Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- , *Pergumulan Dunia Pesantren*, Jakarta: P3M, 1974.
- , *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- , *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- , *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Leppenias, 1981.
- Wallace, Anthony, *An Antropological View*, New York: Random House, 1966.
- Watt, Montgomery, *Islamic Fundamentalism and Modernity*, London: Routledge, 1988.
- Watt, *The Formative Period of Islamic Thought*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1973.
- Weber, Max, *Economy and Society*, New York: Bedminster, 1968.
- , *The Theory of Social and Economic Organization*. Terj. Henderson and Talcott Parsons, New York: The Free Press, 1904.

- Wertheim, W.F., *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*, Bandung: Van Hoeve, 1956.
- Woodward, Mark R., *Jalan Baru Islam*, terj. Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Religius Kebatinan*, terj. Hairus Salim HS, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Yewangoe, A.A., *Theologia Crucis di Asia, Pandangan-pandangan Orang Kristen Asia Mengenai Penderitaan dalam Kemiskinan dan Keberagamaan di Asia*, terj. Steven Suleeman, Jakarta: Gunung Mulia, 1989.
- Yunanto, S., *Pintu-pintu Menuju Kebangkitan Islam & Indonesia*, Jakarta: Forpis, 1999.
- Zainuddin, A. Rahman, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Zuhri, Saefuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1979.

Nama-Nama Kiai yang Diwawancarai:

- Wawancara, K.H. Sonhaji, 15 April 2006.
- Wawancara dengan K.H. Totoh Abdul Fatah, 17 April 2006.
- Wawancara dengan K.H. Asy'ari, 20 April 2006.
- Wawancara dengan K.H. Ceng Aam Ridwan, 29 April 2006.
- Wawancara dengan K.H. Yusuf, 29 April 2006.
- Wawancara dengan K.H. Masdar Helmy, 4 Mei 2006.
- Wawancara dengan K.H. Abdullah Bakri, 4 Mei 2006.
- Wawancara dengan K.H.E. Fachruddin Masthuro, 13 Mei 2006.
- Wawancara dengan Hamdun Ahmad, 13 Mei 2006.



Lampiran

ALAT PENGUMPULAN DATA

No	Pertanyaan Umum	Pendekatan	Variabel Bidang	Indikator
I	Mengapa istighatsah di lingkungan masyarakat Nahdiyyin Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan melalui institusi sosial atau institusi Pemerintah hingga saat ini masih dipertahankan	1. Pendekatan Sisiologis 2. Pendekatan Antropologis.	1. Bidang Sosial 2. Bidang Politik 3. Bidang Ekonomi 4. Bidang Agama 1. Bidang Sosial 2. Bidang Politik 3. Bidang Budaya 4. Bidang Agama	
II	Faktor-faktor apa yang memengaruhi pelaksanaan Istighatsah di kalangan masyarakat Nahdiyyin Provinsi Jawa Barat	1. Pendekatan Sosiologis 2. Pendekatan Antropologis	1. Bidang Sosial 2. Bidang Politik 3. Bidang Ekonomi 4. Bidang Agama 1. Bidang Sosial 2. Bidang Politik 3. Bidang Budaya 4. Bidang Agama	
III	Apa fungsi istighatsh dalam perspektif masyarakat muslim Nahdiyyin Provinsi Jawa Barat	1. Pendekatan Sosiologis 2. Pendekatan Antropologis	1. Bidang Sosial 2. Bidang Politik 3. Bidang Ekonomi 4. Bidang Agama 1. Bidang Sosial 2. Bidang Politik 3. Bidang Budaya 4. Bidang Agama	

I. Mengapa Istighosah di kalangan masyarakat Nahdliyin Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Melalui Institusi Sosial atau Institusi Pemerintah sampai saat ini masih dipertahankan?

1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan *istighatsah* di kalangan masyarakat nahdliyin Provinsi Jawa Barat?
2. Apa makna dan Pengertian *istighatsah* menurut Anda?
3. Di kalangan Masyarakat Muslim Nahdliyin, yang anda ketahui, apakah ada kesepakatan tentang makna dan dan pengertian tersebut? Apakah Persamaan dan perbedaan pemaknaaa terhadap *istighatsah* menurut kalangan masyarakat Muslim Nahdliyin dengan makna atau konsep yang dikemukakan oleh komunitas masyarakat muslim selain Nahdliyin?
4. Di Kalangan Masyarakat Nahdliyin, Siapa yang pertama kali menggagas konsep *istighatsah* sebagaimana yang anda kemukakan?
5. Apakah terdapat nash sharih, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits yang secara spesifik membahas, atau memerintahkan masyarakat Muslim untuk melaksanakan *istighatsah*?
6. Nash-nash tersebut, difahami oleh ulama Nahdliyin, relevansinya dengan pendapat Ulama Salafiyah yang dijadikan rujukan, seperti apa?
7. Hukum *istighatsah* dan *istinbath ahkam*-nya, bagaimana?
8. Kapan saja *istighatsah* dapat atau harus dilaksanakan?
9. Siapa saja, yang berhak dan atau berkewajiban melaksanakan *istighatsah*?
10. Kecenderungan kuat dan motivasi pelaksanaan Istghatsah di kalangan masyarakat Nahdliyin pada even penting apa saja?
11. Prinsip-prinsip dan proses pelaksanaan *istighatsah*, apa saja dan bagaimana?
12. Mengapa pelaksanaan *istighatsah* di kalangan masyarakat Nahdliyin cenderung dilakukan secara massal? Apa perbedaan essensial dari pelaksanaan *istighatsah* massal dengan *istighatsah* individual atau keluarga?
13. Dampak yang diharapkan dari *istighatsah* massal?
14. *Istighatsah* massal cenderung dikaiikan dengan kepentingan yang bersifat kondisional. nasional maupun lokal, baik ekonomi, sosial budaya dan politik. Mengapa?

15. *Istighatsah* di kalangan Masyarakat Nahdhiyin langsung atau tidak langsung telah menjadi institusi sosial, yang juga dilakukan oleh institusi pemerintahan. Bagaimana proses pelebagaannya?
16. Ciri-ciri perilaku social individu dan masyarakat yang suka melaksanakan *istighatsah* dengan yang tidak suka melaksanakan, apakah dapat dibedakan?
17. Dalam hubungannya dengan krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997,

II. Faktor-faktor Apa yang mempengaruhi Pelaksanaan *istighatsah* di Kalangan Masyarakat Nahdliyin Provinsi Jawa Barat?

1. Pada masa krisis multidimensional ini terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *istighatsah* di lingkungan masyarakat Nahdliyin; Manakah yang menjadi faktor determinan, apakah faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, atau faktor lainnya?
2. Faktor ekonomi dan sosial budaya serta agama, cenderung dinilai sebagai faktor ikutan, yang kemudian tetumpu kepada faktor politik, mengapa?
3. Faktor sosial budaya, termasuk di dalamnya masalah agama, mengapa tidak dipandang sebagai faktor determinan? Bukankah masyarakat Nahdliyin terkenal dengan watak religiusitasnya?
4. Kendatipun faktor ekonomi sebagai faktor yang cukup dominant, apakah pada momen tertentu dapat menjadi faktor utama sebagaimana faktor politik?
5. Apakah hal ini dapat berlaku pula pada faktor sosial budaya dan agama?
6. *Istighatsah* dapat mendorong dinamika masyarakat Nahdliyin, bagaimana mobilitas masyarakat pada saat dilaksanakan, sebelum dan sesudah mereka melaksanakan *istighatsah*?
7. Adakah pola-pola hubungan social yang khas, pada masyarakat pelaksana *istighatsah*?
8. Bagaimana sistem kekerabatan yang dibangun dari, dalam, maupun pasca *istighatsah*?
9. Adakah cirri-ciri stratifikasi sosial yang khas dalam pelaksanaan *istighatsah*?

III. Apa Fungsi Istighatsah dalam Perspektif Masyarakat muslim Nahdliyin Provinsi Jawa Barat?

1. *Istighatsah* dilakukan secara massal, apa fungsi essensial yang muncul dan diharapkan dari pelaksanaan *istighatsah* bagi masyarakat Nahdliyin Jawa Barat?
2. Pemaknaan tentang kebersamaan dalam konteks pelaksanaan *istighatsah*, apakah ada relevansinya dengan realisasi konsep Ukhuwwah Islamiyah menurut-ajaran Islam?
3. Bentuk-bentuk kebersamaan tersebut apakah dapat mewujudkan kesatuan dan persatuan sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip nasionalisme dan humanisme dalam kontek Negara Kesatuan Republik Indonesia?
4. Sasarannya terhadap integritas sosial, ekonomi, politik, dan agama?
5. Kemajuan-kemajuan yang diharapkan bagi bangsa Indonesia pasca pelaksanaan *istighatsah* di masyarakat Nahdliyin Jawa barat?

RANGKUMAN HASIL DIALOG WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN

IV. Mengapa *istighatsah* di Kalangan masyarakat Nahdliyin Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan melalui Institusi Sosial atau Institusi Pemerintah sampai saat ini masih dipertahankan?

- a. Prof. Drs. KH. Masdar Helmi:

Istighatsah merupakan bagian ajaran Islam yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. kemudian ditradisikan secara turun-temurun melalui para sahabat dan ulama Islam hingga kini. Walaupun pada kenyataannya penamaan *istighatsah* yang pada hakikatnya merupakan doa bersama, cenderung lebih memasyarakat di kalangan muslim Nahdliyin. Di kalangan selain Nahdliyin ada istilah *muhasabah*, *dzikir*, *wirid*, dsb. Hal tersebut penting dilaksanakan untuk menyatukan itikad umat Islam agar hidup dan masalah-masalah yang dihadapi dapat dipecahkan secara bersama yang dibarengi kekuatan dan pertolongan Allah SWT”.

b. KH. Ceng Aa Ridwan

“Penting dipertahankan untuk membina kesadaran beragama masyarakat muslim Nahdliyin, sehingga perilaku mereka tetap berada dalam jalur tuntutan agama Allah Swt. serta masalah-masalah yang dihadapi umat Islam dapat segera tuntas atas dasar ridla Allah Swt”.

c. K.H. Abdullah Bakri

“*Istighatsah* bukan sekedar tradisi keagamaan, tetapi ia juga merupakan khazanah umat yang mendorong semangat kehidupan untuk mewujudkan ketakwaan terhadap Allah Swt. Ia juga merupakan sebuah kekuatan spiritual yang harus lahir dari setiap lubuk hati orang yang beriman. Karena itu ia adalah senjata bagi manusia yang beradab”.

d. K.H. Yusuf

“Sebagai bukti kesehatan mental umat dan bertujuan untuk mengendalikan hawa nafsu dari berbagai gangguan setan yang melanda budaya umat manusia”.

e. K.H. Asyarie

“Sarana dzikir dan sarana introspeksi yang disyariatkan oleh Allah Swt”.

V. Bagaimana latar belakang pelaksanaan *istighatsah* di kalangan masyarakat Nahdliyin Provinsi Jawa Barat?

a. Prof. Drs. K.H. Mashdar Helmi

“Secara historis ia merupakan amalan yang telah melembaga di kalangan umat Islam pada setiap zaman. Di Indonesia, dilaksanakan sejak ummat Islam ada di tatar nusantara. Sekarang, cenderung dilaksanakan secara kondisional, tergantung kepada konteks masalah-masalan umat yang yang dihadapi oleh mereka. Terutama ketika terjadi krisis multi dimensional diakhir tahun 1997. Sebagai akibat kerusakan mental dan akhlaq para penguasa di zaman Orde Baru yang terwariskan hingga kini.”

1) Apa makna dan pengertian *istighatsah* menurut anda?

2) Di kalangan masyarakat muslim Nahdliyin, yang anda ketahui, apakah ada kesepakatan tentang makna dan dan pengertian tersebut? Apakah persamaan dan perbedaan pemaknaan terhadap *istighatsah* menurut kalangan masyarakat muslim Nahdliyin dengan makna atau konsep yang dikemukakan

oleh komunitas masyarakat muslim selain Nahdliyin?

- 3) Di kalangan masyarakat muslim Nahdliyin, Siapa yang pertama kali menggagas konsep *istighatsah* sebagaimana yang anda kemukakan?
- 4) Apakah terdapat nash sharih, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits yang secara spesifik membahas, atau memerintahkan masyarakat muslim untuk melaksanakan *istighatsah*?
- 5) Nash-nash tersebut, dipahami oleh ulama Nahdliyin, relevansinya dengan pendapat ulama Salafiyah yang dijadikan rujukan, seperti apa?
- 6) Hukum *istighatsah* dan istinbath ahkamnya, bagaimana?
- 7) Kapan saja *istighatsah* dapat atau harus dilaksanakan?
- 8) Siapa saja, yang berhak dan atau berkewajiban melaksanakan *istighatsah*?
- 9) Kecenderungan kuat dan motivasi pelaksanaan *istighatsah* di kalangan masyarakat muslim Nahdliyin pada event penting apa saja?
- 10) Prinsip-prinsip dan proses pelaksanaan *istighatsah* apa saja dan bagaimana?
- 11) Mengapa pelaksanaan *istighatsah* di kalangan masyarakat muslim Nahdliyin cenderung dilakukan secara massal? Apa perbedaan esensial dari pelaksanaan *istighatsah* masal dengan *istighatsah* individual atau keluarga?
- 12) Dampak yang diharapkan dari *istighatsah* masal?
- 13) *Istighatsah* masal cenderung dikaitkan dengan kepentingan yang bersifat kondisional, nasional maupun lokal, baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Mengapa?
- 14) *Istighatsah* di kalangan masyarakat muslim Nahdliyin langsung atau tidak langsung telah menjadi institusi sosial, yang juga dilakukan oleh institusi pemerintahan. Bagaimana proses pelembagaannya?
- 15) Ciri-ciri perilaku sosial individu dan masyarakat yang suka melaksanakan *istighatsah* dengan yang tidak suka melaksanakan apakah dapat dibedakan?
- 16) Dalam hubungannya dengan krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997?

Lampiran**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : K.H. Sonhaji

Alamat : Sukamiskin, Bandung Timur

Jabatan : Pesantren Sukamiskin Bandung Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah diwawancarai oleh H. Boedi Abdullah dalam kaitannya dengan penelitian tentang Institusionalisasi Doa dalam Struktur Masyarakat Indonesia pada:

Hari Tanggal : Sabtu 15 April 2006

Waktu : 13.00 s.d.15.00

Demikian pernyataan ini dibuat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Bandung, 15 April 2006

Hormat Saya,



K.H. Sonhaji

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : K.H. Totoh Abdul Fatah

Alamat : Cileunyi, Bandung Timur

Jabatan : Direktur Pesantren Al-Jawami Bandung Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah diwawancarai oleh H. Boedi Abdullah dalam kaitannya dengan penelitian tentang Institusionalisasi Doa dalam Struktur Masyarakat Indonesia pada:

Hari Tanggal : Senin 17 April 2006

Waktu : 13.00 s.d.15.00

Demikian pernyataan ini dibuat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Bandung, 17 April 2006

Hormat Saya,



K.H. Totoh Abdul Fatah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : K.H. Asy'ari

Alamat : Cikancung-Majalaya

Jabatan : Pimpinan Pontren Al-Ilham/ Pengurus NU Bandung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah diwawancarai oleh H. Boedi Abdullah dalam kaitannya dengan penelitian tentang Institusionalisasi Doa dalam Struktur Masyarakat Indonesia pada:

Hari Tanggal : Sabtu 14 April 2006

Waktu : 13.00 s.d.15.00

Demikian pernyataan ini dibuat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Bandung, 14 April 2006

Hormat Saya,



K.H. Asy'ari

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : K.H. Ceng Aam Ridwan

Alamat : Tarogong - Garut

Jabatan : Pimpinan Pontren Al-Ilham/ Pengurus NU Bandung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah diwawancarai oleh H. Boedi Abdullah dalam kaitannya dengan penelitian tentang Institusionalisasi Doa dalam Struktur Masyarakat Indonesia pada:

Hari Tanggal : Sabtu 29 April 2006

Waktu : 16.00 s.d.17.30

Demikian pernyataan ini dibuat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Bandung, 29 April 2006

Hormat Saya,



K.H. Ceng Aam Ridwan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : K.H. Yusuf

Alamat : Selaawi Limbangan

Jabatan : Pimpinan Pontren As-Sifa / Pengurus NU Garut

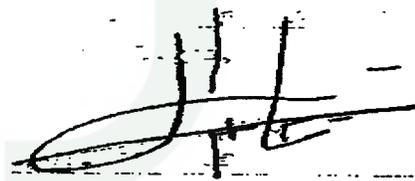
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah diwawancarai oleh H. Boedi Abdullah dalam kaitannya dengan penelitian tentang Institusionalisasi Doa dalam Struktur Masyarakat Indonesia pada:

Hari Tanggal : Sabtu, 29 April 2006

Waktu : 14.00 s.d. 16.00

Demikian pernyataan ini dibuat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Garut, 29 April 2006
Hormat Saya



K.H. Yusuf

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : Prof. Drs. K.H. Masdar Helmi
Alamat : Jl. Suryalaya XIII No. 18 Bandung
Jabatan : Ketua Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah NU

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah diwawancarai oleh H. Boedi Abdullah dalam kaitannya dengan penelitian tentang Institusionalisasi Doa dalam Struktur Masyarakat Indonesia pada:

Hari Tanggal : Rabu, 12 April 2006
Waktu : 14.00 s.d. 16.00
Tempat : Sekretariat PW NU Jawa Barat

Demikian pernyataan ini dibuat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Bandung, 12 April 2006

Hormat Saya,



Prof. K.H. Masdar Helmi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : K.H. Abdullah Bakri

Alamat : Tanjung-Limbangan

Jabatan : Pimpinan Pontren Al-Ulum/ Pengurus NU Garut

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah diwawancarai oleh H. Boedi Abdullah dalam kaitannya dengan penelitian tentang Institusionalisasi Doa dalam Struktur Masyarakat Indonesia pada:

Hari Tanggal : Kamis, 4 Mei 2006

Waktu : 08.00 s.d. 11.00 WIB

Demikian pernyataan ini dibuat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Garut, 4 Mei 2006

Hormat Saya



K.H. Abdullah Bakri

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : K.H. E. Fakhruddin Masthuro

Alamat : Tipar Cisaat Sukabumi

Jabatan : Direktur Perguruan Islam Al-Masthuriyah Sukabumi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah diwawancarai oleh H. Boedi Abdullah dalam kaitannya dengan penelitian tentang Institusionalisasi Doa dalam Struktur Masyarakat Indonesia pada:

Hari Tanggal : Sabtu, 13 Mei 2006

Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB

Demikian pernyataan ini dibuat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Sukabumi, 13 Mei 2006

Hormat Saya



K.H. E. Fakhruddin Masthuro

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : K.H. Hamdun Ahmad
Alamat : Tipar Cisaat Sukabumi
Jabatan : Care Taker PKB DKI Jakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah diwawancarai oleh H. Boedi Abdullah dalam kaitannya dengan penelitian tentang Institusionalisasi Doa dalam Struktur Masyarakat Indonesia pada:

Hari Tanggal : Rabu, 13 Mei 2006
Waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIB

Demikian pernyataan ini dibuat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Sukabumi, 13 Mei 2006

Hormat Saya



K.H. Hamdun Ahmad

DO'A ISTIGHATSAH

الإستغاثة لحضرة رب البرية

للشيخ خليل بنكلان ورملي تميم فقير وغان

- ١٠٠× الفاتحة ٠١
- ١٠٠× أستغفر الله العظيم ٠٢
- ١٠٠× لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠٣
- ١٠٠× لا حول ولا ملجاء من الله إلا إليه ٠٤
- ١٠٠× اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ٠٥
- ١٠٠× الله يا قديم ٠٦
- ١٠٠× يا سميع يا بصير ٠٧
- ١٠٠× يا مبدئ يا خالق ٠٨
- ١٠٠× يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله ٠٩
- ١٠٠× يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ٠١٠
- ١٠٠× يا لطيف ١١٠
- ١٠٠× أستغفر الله العظيم أنه كان غفارا ٠١٢
- ١٠٠× اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادر كني يا رسول الله .. ٠١٣
- ٠١٤ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
تحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل
شدة و نفس بعدد كل معلوم لك ١٠٠×
- ٠١٥ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجيننا بها من جميع الأحوال
والأفات وتقضى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع
السيئات وترفعن بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرة في الحيات وبعد الممات ١٠٠×
- ١٠٠× يا بديع ٠١٦
- ٠١٧ الله اكبر ٣× يا ربنا و الهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على

- قوم الكافرين ١٠٠x
١٨. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا و دفعت عنكم
السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ١٠٠x
١٩. ألحمد لله الذي انعم علينا وهدينا على دين الإسلام ١٠٠x
٢٠. بسم الله ماشاء الله لا يسوق الخير إلا بالله ١x
٢١. بسم الله ماشاء الله لا يصرف السوء إلا بالله ١x
٢٢. بسم الله ماشاء الله ما كان من نعمن الله ١x
٢٣. بسم الله ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ١x ٣x
٢٣. بسم الله ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ١x
- العلي العظيم ١x
٢٤. سالتك ياغفار عفوا وتوبة * و بالقهر ياقهار خذ من تحيلا ٣x
- يا جبار يا ذا البطش الشد الشديد خذ حقنا وحق
المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا على
المسلمين ٣x
٢٥. الفاتحة و الهليل ١x

باندوغ ١٥ جولى ٢٠٠٢ الامام

ttd

كياي هاج مهيمن اكونردا

SHOLAWAT THORIQOH

(الصلوة الطريقة)

(استغاثة من كونور كياي الحاج اكهام فالكا جاكارتا)

١. اللهم صل وسلم على محمد وصحبه أجمعين
٢. اللهم اهدنا لطريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين
٣. اللهم اهدنا لطريق المستقيم طريقا من روح جبريل المتين
٤. اللهم اهدنا لطريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين
٥. اللهم اهدنا لطريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين
٦. اللهم اهدنا لطريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين
٧. اللهم اهدنا لطريق المستقيم طريق العلماء والمخاء والعاملين
٨. اللهم اهدنا لطريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين
٩. اللهم اهدنا لطريق المستقيم طريق السعداء والغائبين
١٠. اللهم اهدنا لطريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين
١١. اللهم اهدنا لطريق المستقيم طريق البدلاء والقانتين
١٢. اللهم اهدنا لطريق المستقيم طريق الآصفياء والذاكرين

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama : H. Boedi Abdullah
 Tempat/Tgl Lahir : 4 April 1948
 NIP : 150 197 871
 Pangkat Golongan : Pembina Utama Muda IV/C
 Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan.
 Alamat Rumah : JL. Muhammadiyah No. 11 Garut Rt 02/06 Kode Pos REGOL
 44114- Garut Telp. (0262) 233035
 Alamat Kantor : JL. Raya Cipadung 105 Bandung 40614 Telp. (022) 780 3936
 Bandung.
 Nama Ayah : Kiai Muhammad Syafei Farid Rijalullah (alm)
 Nama Ibu : Siti Nurjanah (alm)
 Nama Istri : Hj. Euis Hidayati
 Nama Anak : Fitra Cholifa Buwana S.P (Filit)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri 6 tahun : Lulus 1960
- b. Pendidikan Guru Agama (PGAP) 4 tahun : Lulus 1966
- c. Pendidikan Guru Agama 2 tahun (PGAAN) : Lulus 1968
- d. Sarjana Muda IAIN SGD Bandung (Fak. Syariah) : Lulus 1973
- e. Sarjana Lengkap IAIN SGD Bandung (Fak. Syariah) : Lulus 1978
- f. Strata 2 (S2) Pascasarjana IAIN SGD Bandung : Lulus 2000
- g. Strata 3 (S3) Program Doktor Pasca Sarjana UIN Kali Jaga Yogyakarta
- h. Fakultas Hukum UNLA (NIM A 893 050 No. 196/UNLA/F.H/VII/40)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pesantren selama 5 tahun (tanpa ijazah) 1960-1965 di Limbangan-Garut
- b. Kursus Pertanian di Bandung pada tahun 1967 (Kec. Kiaracondong)
- c. Stabilitas Keamanan (Kodam VI Siliwangi)

- d. Teori Dasar Pengamanan di Polda
- e. Spala DEPAG RI (VIII/1983 selama 100 jam)
- f. Pelatihan Penyaluran Kuliah Kerja Nyata (KKN) tanggal 4-10 September 199
No. 364/DS/4/1995/DEPDIK Dirjen Pendidikan Tinggi- Bogor
- g. Kepramukaan (Gudep) IAIN se-Indonesia di Solo-Jawa Tengah tahun 1987

3. Pelatihan

- a. Pelatihan Kepemimpinan No. 12/B/PKMTD/XI/1996-Fsy/Bdg
- b. Administrasi Kepegawaian No. 00257/F.7/0/1987-Bdg.
- c. Kewenangan Mengajar No. VII/STKM/343/1984 Menteri Agama Jkt

C. Riwayat Pekerjaan

1. Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Tanggal/Tahun
a	Calon Pegawai	III/A	1 Maret 1980
b	Asisten Ahli Madya	III/A	1 April 1982
c	Asisten Ahli	III/B	1 April 1984
d	Lektor Muda	III/C	1 April 1987
e	Lektor Madya	III/D	1 Oktober 1990
f	Lektor	IV/A	1 Oktober 1992
g	Lektor Kepala Madya	IV/B	1 Oktober 1997
h	Pembantu Utama Muda	IV/C	1 Oktober 1999

2. Jabatan Yang Dipegang

No	Jabatan Struktural	SK Pengangkatan
1	Dosen Fakultas Syariah	B II/3-F 01-04-82
2	Pembantu Dekan III	B II/3/6410-2F-07-96
3	Kepala Perpustakaan	IN.10/A/KP/07.6/377-10-8-2000
4	Kasubag Rumah Tangga	IN. 795/B-7/0/1980
5	Kepala Bagian Umum	IN. 02/B-5/0/1982
6	Kepala Informasi dan pemeriksa calon pegawai negeri sipil (PNS) di IAIN	No. IN. 10/0/KP 07.6/194/1996

7	Warga di Intel Dam III Siliwangi	Ket/1575/STAMAS/XI/92
8	Koordinator perpustakaan perguruan tinggi (UIN-IAIN, dan UIS) se Jawa dan Mataram	045/STITS/F.1/1987

3. Pengalaman Organisasi

- a. Kosma di Fak. Syariah.
- b. Bendahara Senat Mahasiswa Fak. Syariah.
- c. Pembina Aliansi IAIN SGD Kab. Garut tahun 1982-1996.
- d. Pembina Mahasiswa IAIN SGD Bandung Kab. Garut tahun 1990-sekarang.
- e. Ketua Pemuda (Taruna Karya/ Kec. Kiaracondong Kota Bandung tahun 1970-1972.
- f. Ketua Pemuda (Taruna Karya/ Kec. Cibeunying Kota Bandung tahun 1973-1974.
- g. Ketua DKM Al-bagria JL. Muhamadiyah, Garut (sekarang)
- h. Anggota Senat Fak. Syariah tahun 1989.
- i. Anggota Senat Al-Jamiah (Institut) tahun 1998.
- j. KAPPI, tahun 1965-1968.
- k. Wakil Senat Yayasan Tunas Bangsa- Bandung No. 105/01/SK/4BTB
- l. Anggota
- m. Anggota IPI (Ikatan Perpustakaan Indonesia) KP. 07.6/27/1999

4. Seminar Nasional

- a. Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia.
- b. Peningkatan kinerja Departement Agama dalam upaya pembenahan umat tahun 2000.
- c. Strategi pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, tahun 2005.
- d. Diskusi buku dan talk show pada tahun 2002
- e. Etika profesi dan kiat penelitian budaya (Jakarta 2004).
- f. Forum perpustakaan nasional perguruan tinggi pada tahun 2000.
- g. Perpustakaan digital software-SPISIS ITB, Bandung.

- h. Kepramukaan (Solo 1998)
 - i. Strategi Nasional (Jakarta 2002)
 - j. Etika profesi dan kiat penelitian buku ajar (Jakarta 2004)
- 5. Penelitian**
- a. Perkawinan usia muda didaerah pantai Indramayu.
 - b. Susunan/system waris di pedesaan Kecamatan Indramayu.
 - c. Kependudukan (Penetrasi muslim dan non muslim di Kabupaten/Kota madya Sukabumi.
 - d. Strategi pengembangan perpustakaan IAIN SGD Bandung.
 - e. Pola pengembagn perpustakaan UIN SGD Bandung.
 - f. Penelitian kelompok dosen Fak. Syariah In. 10/FS/KP. 02.3560/1998.
- 6. Penghargaan**
- a. Bintang Satya Lancana Presiden RI –2003 No. 18443/4.24/2003.
 - b. Time teaching FS/No. In 10/FS/PP 009/253/2001.
- 7. Kunjungan Keluar Negeri/Studi Banding**
- a. Tahun 2000 ke Universitas Kebangsaan Malaysia In.10/KP. 01.2/565/2000.
 - b. International Islamic University Malaysia In.10/KP.01.2/565/2000.
 - c. National Library Board Singapore 2005.
 - d. National University Of Singapore
 - e. Perpustakaan Negeri Malaysia In.00/496/2005.
- 8. Makalah**
- a. Teologi Islam di Indonesia.
 - b. Perkembangan akidah dalam Ushul Fiqh.
 - c. Risalah Jumat (Ushuluddin).
 - d. Perkembangan Ushul Fiqh sesudah fuqoha.
 - e. Ushul Fiqh, Filsafat dan metodologi Hukum Islam.
 - f. Kaidah-kaidah dalam Ushul Fiqh, faktor dan dampak.
 - g. Al-Adat, Al-Muhhamat
 - h. Konsistensi metode Istinbath Al-Ahkam dalam penetapan fatwa MUI Jawa Barat.
 - i. Al-Masiaqqatu Tajhribat At-Taisir

- j. Beberapa aliran untuk memakai Maqosid al-Syariyyah.
 - k. Peran Islam dalam globalisasi budaya.
 - l. Kedudukan anak diluar perkawinan menurut Imam Asy-Syafei dan Abu Hurairah.
 - m. Kafaad masa kini.
 - n. Taqsis jubal dalam Islam.
9. Buku-Buku
- a. Boedi Absullah, *Ushul Fiqh: Pengantar Memahami Metodologi Hukum Islam*, Tsabita, Bandung, Cetakan I, 2003.
 - b. Boedi Absullah, *Qaidah Lughowiyah Ushuliyah (Memahami Hukum Islam Melalui Pendekatan Bahasa)*, Tsabita, Bandung, Cetakan I, 2005.